

2023



LAPORAN AKHIR

PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (HOME INDUSTRI)



KATA PENGANTAR

Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan UMKM dan Industri Berbasis Keluarga (Home Industry) di Kota Palembang ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota melalui Bappeda Kota Palembang untuk membuat perencanaan dan pembangunan kota yang lebih baik dan terarah.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan pembuatan dokumen ini. Semoga pembuatan dokumen ini memberikan manfaat dan arahan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Palembang, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	4
C. SASARAN	4
D. LANDASAN HUKUM	4
E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	5
F. KELUARAN.....	5
G. LOKASI PEKERJAAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. KONSEP UMKM	6
B. KONSEP HOME INDUSTRY	10
C. STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DAN HOME INDUSTRI.....	13
BAB III METODOLOGI	17
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN	17
B. METODE PELAKSANAAN	21
C. PERSIAPAN.....	23
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	25
E. TEKNIK ANALISIS.....	27
F. RENCANA KERJA.....	31
G. KERANGKA PIKIR KAJIAN.....	34
F. KEBUTUHAN DATA.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. MENGIDENTIFIKASI KONDISI EKSISTING KEBERADAAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (HOME INDUSTRY).....	38
B. MEMETAKAN POTENSI UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (HOME INDUSTRY).	63

**C. MERUMUSKAN STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (HOME INDUSTRY)..... 71**

DAFTAR PUSTAKA..... 94

DAFTAR LAMPIRAN.....91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Kota Palembang	21
Tabel 3.2 Kebutuhan data.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Usaha Mikro di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan	39
Tabel 4.2 Jumlah Usaha Kecil di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Usaha Menengah di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan	42
Tabel 4.4 Jumlah UMKM berdasarkan total hasil penjualan Kota Palembang tahun 2022.....	44
Tabel 4.5 Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga Kota Palembang berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan	46
Tabel 4.6 Persebaran kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.....	64
Tabel 4.7 Skoring isu-isu strategis UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota	73
Tabel 4.8 SWOT UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.....	75
Tabel 4.9 Matching Tools dalam analisis SWOT UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	77
Tabel 4.10 Rumusan program UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Luas Wilayah menurut Kecamatan	18
Gambar 3.2	Peta administrasi di kota Palembang.....	19
Gambar 3.3	Kerangka Pikir Kajian	34
Gambar 4.1	Diagram jumlah Usaha Mikro di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan	40
Gambar 4.2	Diagram Jumlah Usaha Kecil di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan	42
Gambar 4.3	Diagram jumlah Usaha Menengah di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan.....	43
Gambar 4.4	Diagram jumlah UMKM berdasarkan total hasil penjualan di Kota Palembang tahun 2022.....	45
Gambar 4.5	Diagram jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga Kota Palembang berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan	47
Gambar 4.6	Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan usia.....	48
Gambar 4.7	Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis kelamin	49
Gambar 4.8	Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan.....	49
Gambar 4.9	Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis pekerjaan.....	50
Gambar 4.10	Diagram keterkaitan jenis pekerjaan dengan aktivitas usaha yang dijalankan (UMKM)	51
Gambar 4.11	Diagram persentase jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	52
Gambar 4.12	Diagram persentase bentuk usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	53
Gambar 4.13	Diagram persentase lokasi usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.....	54
Gambar 4.14	Dilihat diagram persentase tahun mulai usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	54
Gambar 4.15	Diagram persentase perizinan usaha (kepemilikan NIB) dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	55
Gambar 4.16	Diagram persentase jumlah pegawai yang dimiliki dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	56
Gambar 4.17	Diagram persentase partisipasi bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	56
Gambar 4.18	Diagram persentase jenis bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	57
Gambar 4.19	Diagram penyelenggara bimbingan teknis teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	58
Gambar 4.20	Diagram administrasi usaha yang digunakan teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	59
Gambar 4.21	Diagram pemasaran produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	60

Gambar 4.22	Diagram kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.....	61
Gambar 4.23	Diagram total aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	61
Gambar 4.24	Diagram total hasil penjualan yang telah dicapai oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga	62
Gambar 4.25	Peta persebaran jenis UMKM dan industri berbasis keluarga	68
Gambar 4.26	Peta Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	69
Gambar 4.27	Peta kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga.....	70
Gambar 4.28	Isu-isu strategis terpenting berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	72
Gambar 4.29	Isu-isu strategis paling bermasalah berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang	73
Gambar 4.30	Strategi pengembangan UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi pada saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan saja, akan tetapi harus dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut tertuang dalam model pembangunan ekonomi inklusif. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi inklusif yaitu dalam bentuk pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Di sisi lainnya, Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat yang berdaya, yaitu memiliki kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik-material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemberdayaan sangat penting dalam membangun masyarakat untuk bisa mandiri. Kemandirian masyarakat akan membawa kemajuan suatu negara.

Sebagai bentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengusulkan salah satu cara yaitu mengoptimalkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan memiliki daya tahan yang dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi, terutama disaat kelesuan ekonomi global yang berdampak pada pelaku ekonomi menengah atas. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, jumlah UMKM menurut skala usaha berdasarkan omzet tahunan per Desember 2022 sebanyak 80.627 UMKM yang tersebar secara merata di setiap Kecamatan di Kota Palembang (Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang, 2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu berupaya mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif. Strategi utama dalam model pembangunan ekonomi inklusif adalah menyediakan lapangan kerja yang produktif khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu bekerja atau yang kurang mendapatkan manfaat adanya pembangunan, pelayanan publik dan dukungan kebijakan publik yang memadai serta berfokus pada pengembangan model pembangunan ekonomi wilayah yang mengkaji strategi potensi ekonomi daerah terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Strategi tersebut, salah satunya melalui upaya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagaimana diuraikan dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.*

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Di sisi lainnya, *Home industry* merupakan bagian usaha yang masuk dalam kategori UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi makro dilakukan pada koperasi dan UMKM. *Home industry* sendiri mempunyai peranan dalam pembangunan dan termasuk dalam kategori usaha kreatif, sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan kreativitas. Karakteristik industri kreatif sebagian besar

ada pada skala UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Suatu ide yang dikembangkan secara kreatif dan dapat memiliki nilai tambah, baik dari produk yang dihasilkan maupun nilai tambah dari produk sampingan akan membawa perubahan pada tumbuhnya aspek percaya diri masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya pembelajaran yang *sustainable*. Pembelajaran yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap masyarakat terhadap sesuatu yang memiliki nilai lebih dari usaha yang dilakukan sebelumnya. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan.

Ditingkat kota dan kabupaten peran UMKM tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini dikarenakan UMKM merupakan entitas produsen sekaligus konsumen yang cukup besar sehingga uang yang ada dimasyarakat mengalami perputaran dari dan oleh UMKM itu sendiri. Selain itu, UMKM lebih tangguh sehingga lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan moneter (Hamzah & Agustien, 2019). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, tahun 2023 terdapat 80.627 UMKM yang terdaftar (sumsel.antarnews.com), sementara jumlah yang diprediksi sekitar 160 ribu jumlah UMKM. Menyikapi hal tersebut, perlunya dilakukan pendataan ulang atau pemutakhiran terhadap jumlah UMKM di Kota Palembang secara berkala.

Di sisi lainnya, Berdasarkan data perkembangan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Kota Palembang dengan angka tingkat UKM tertinggi sebesar 220.301. Hal tersebut, dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kota Palembang selain sebagai sentral pemasaran produk UMKM di Sumatera Selatan, juga dapat menjadi motivator penggerak umkm di daerah lainnya. Berikut dapat

dilihat data perkembangan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Dengan demikian, berdasarkan empiris yang terdapat di Kota Palembang berkaitan dengan fenomena UMKM dan industri berbasis keluarga maka diperlukan kajian di Kota Palembang yang bertujuan untuk memetakan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memetakan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis Keluarga (*home industry*)

C. SASARAN

Adapun sasaran dari Kajian pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis Keluarga (*home industry*) ialah sebagai berikut:

- A. Mengidentifikasi kondisi eksisting keberadaan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).
- B. Memetakan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).
- C. Merumuskan strategi dan program pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).

D. LANDASAN HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
- B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pada Kajian pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis Keluarga (*home industry*) ialah sebagai berikut:

- A. Melakukan kajian literature melalui data sekunder dilanjutkan survei lapangan untuk menentukan zonasi persebaran dan menentukan potensi UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)
- B. Membuat klasifikasi peta secara spasial terkait potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)
- C. Menyusun strategi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)

F. KELUARAN

Dokumen yang berisikan “Pemetaan pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)” yang meliputi:

- A. Teridentifikasi potensi UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).
- B. Adanya pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).
- C. Adanya strategi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*).

G. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan kajian “Pemetaan pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)” dilakukan di Kota Palembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP UMKM

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009; 16-19).

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut (UU No.20 Tahun 2008):

- a. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta` rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012;11).

Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Selanjutnya, Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 menegaskan bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya

Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

World Bank mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya yaitu seperti di bawah ini (<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>) :

- Usaha Mikro : Jumlah karyawan < 10 orang, Pendapatan setahun < \$100 ribu, dan Kepemilikan aset < \$100 ribu.
- Usaha Kecil : Jumlah karyawan < 30 orang, Pendapatan setahun < US \$3 juta, dan Kepemilikan aset < US \$3 juta.
- Usaha Menengah : Jumlah karyawan maksimal 300 orang, Pendapatan setahun US\$15 juta, dan Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta.

Dalam perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi empat, yaitu (<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>) :

- UMKM sektor informal. Seperti pedagang kaki lima.
- UMKM Mikro: UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- UMKM Kecil Dinamis: UMKM yang sudah mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- Fast Moving Enterprise: UMKM yang sudah berwirausaha dengan cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Sedangkan menurut Pandji Anoraga (2010;32), diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- Modal terbatas.
- Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan

B. KONSEP HOME INDUSTRY

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun

perusahaan. Singkatnya, home industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan "*Home Industry*") adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Pengertian usaha kecil juga secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota, permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, home industri termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta.

Pengertian lain, industri rumah tangga merupakan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko (Suratijah, 1991).

Home industry juga dapat berarti industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu

dan para karyawannya berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan) sehingga memungkinkan kemudahan dalam menjalin komunikasi. Pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang disekitarnya sebagai karyawan. Kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung memberdayakan masyarakat disekitarnya dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga sekiranya. Dengan begitu, home industri ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran (Praditya, 2010).

Industri kecil dalam formatnya bisa disertai dengan home industri atau cottage industry karena kegiatannya dilakukan secara bersahaja, dan pada umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional. Dengan kata lain, pengelolaan organisasi atau manajemen yang diterapkannya masih sederhana dan dilakukan dengan kekeluargaan. Sedangkan kegiatan tersebut terpusat di rumah tangga atau dalam suatu wilayah di tempat kediamannya sendiri yang dilakukan secara musiman, pesanan terbatas (lokal), dan sebagian kecil secara kontinyu terjangkau pemasarannya dan sebagian kecil di ekspor (Pawe, 2007). Lebih lanjut, ada beberapa bentuk dan jenis home industri yang dikenal oleh masyarakat, seperti :

1. Home industri bidang kosmetik (alat-alat kecantikan) contoh : face lotion (lotion muka), skin tonic lotion, cleansing cream, bedak powder minyak rambut kental, minyak rambut hair cream, dan sebagainya.
2. Home industri bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : sabun mandi, sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen, pasta gigi, dan sebagainya.
3. Home industri bidang obat-obatan ringan, contohnya seperti : minyak

- angin, obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk, dan sebagainya.
4. Home industri bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping, dan sebagainya.
 5. Home industri bidang minuman, contoh : soda, jus buah, minuman instan, dan sebagainya.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DAN HOME INDUSTRI

Menurut Chandler (1962:13) Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Quinn (1990) mengemukakan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan. Pada prinsipnya strategi dapat di kelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi (Fredy, 2014). Pertama, Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro contoh, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. Kedua, strategi investasi dimana strategi ini merupakan kegiatan yang beorientasi pada investasi , misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru. Ketiga, Strategi bisnis sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan

keuangan.

Selanjutnya Pearce and Robinson (1997) mengatakan bahwa formulasi strategi telah diawali dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal organisasi dimaksudkan kegiatan untuk menilai apakah organisasi dalam posisi yang kuat (Strength) ataukah lemah (Weaknesses), penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan internal (aset, modal, teknologi) yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai misi yang telah ditetapkan.

Sedangkan analisis eksternal organisasi menunjukkan kegiatan organisasi untuk menilai tantangan (Threat) yang dihadapi dan peluang (Opportunity) yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya mencapai misi organisasi berdasar atas lingkungan eksternalnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam manajemen strategik disebut dengan SWOT analysis. Dari hasil analisis SWOT tersebut organisasi akan menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai dengan strategi korporasi (corporate strategy), atau grand strategy, atau business strategy, serta menentukan tujuan jangka pendek atau tujuan tahunan (annual objective) yang akan dicapai dengan strategi fungsi atau strategi yang ditetapkan pada departemen (Thoyib, 2005).

Donnelly (1996:109) mengemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

- Apa, apa yang akan dilaksanakan
- Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
- Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
- Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan

strategi.

- Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut.
- Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut.

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan Hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut :

- Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.

- Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi

Di sisi lainnya, terdapat beberapa strategi lainnya yang dapat diaplikasikan pada pengembangan potensi UMKM dan industri berbasis keluarga (home industri), yaitu:

1. Strategi Penguatan ialah strategi yang bertujuan untuk memperkuat jalanya usaha sektor UMKM dan home industry agar keberadaanya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan zaman
2. Strategi Pemberdayaan ialah strategi untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka memperdayakan segala sumber daya yang mendukung ke eksistensian pada sektor UMKM dan home industry.
3. Strategi Perlindungan ialah strategi yang dimaksudkan untuk melindungi jalanya UMKM dan home industry, agar hambatan – hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.

BAB III

METODOLOGI

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Letak Kota Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Secara geografis, Kota Palembang memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

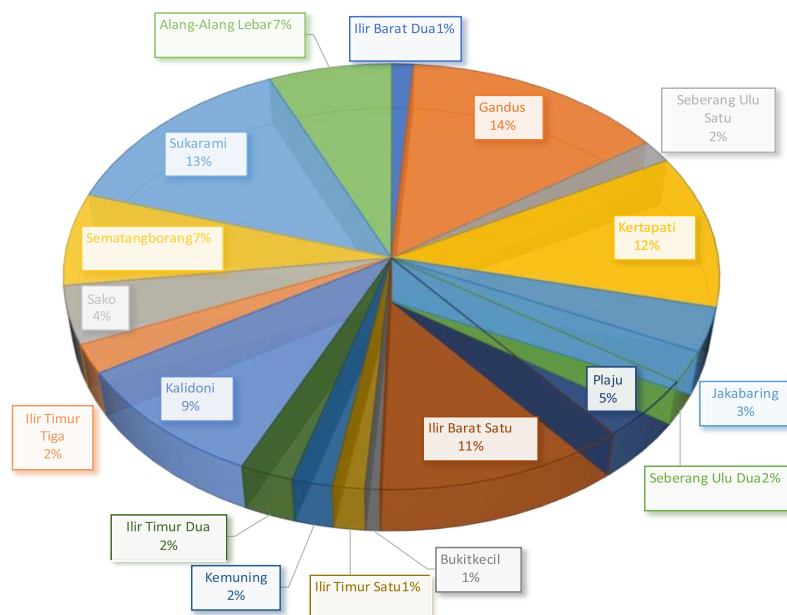
Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
Selatan : Kabutapen Muara Enim
Timur : Kabupaten Banyuasin
Barat : Kabupaten Banyuasin

Selain itu, Kota Palembang sebagai pusat konsentrasi penduduk yang terbesar menjadi pusat orientasi dan pusat pelayanan utama, baik untuk wilayah kota maupun untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan kota perdagangan.

Posisi geografis Kota Palembang sangat menguntungkan karena terletak di tepian Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Bangka. Walaupun tidak berada di tepian laut, Kota Palembang tetap mampu dijangkau oleh kapal-kapal dari luar negeri, terutama dengan adanya Dermaga Tangga Buntung dan Dermaga Sei Lais. Melalui rute udara, Kota Palembang juga dapat dijangkau melalui jalur penerbangan dengan adanya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu Kota Palembang terkenal sebagai kota tua yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Buddha dan banyak terdapat peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan wilayah sekitarnya. Situs-situs budaya tersebut masih belum terawat dan dikelola dengan baik.

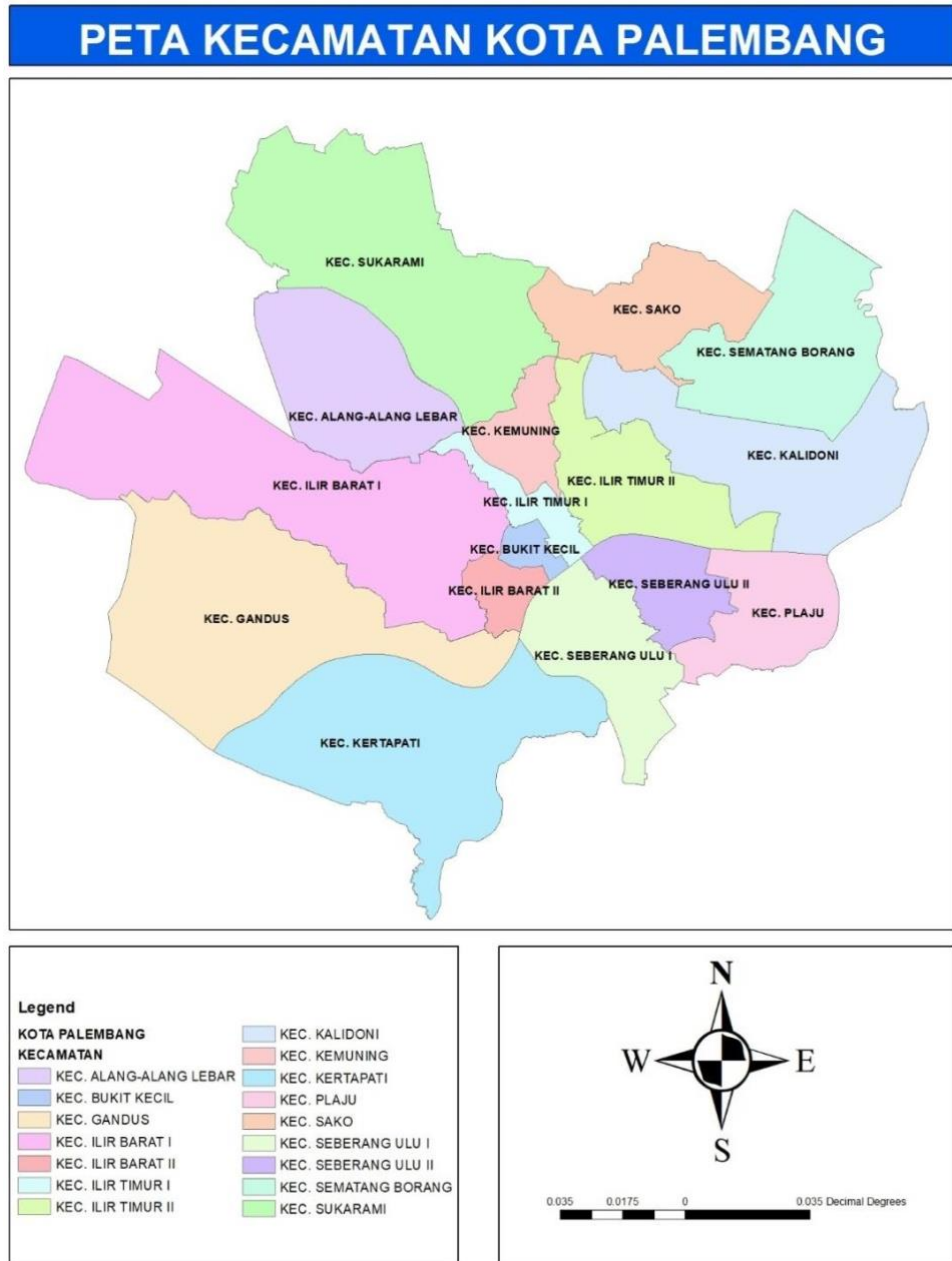
Contohnya seperti Benteng Kuto Besak yang bahkan menjadi polemik karena dijadikan sebagai tempat perniagaan.

Kota Palembang terletak di antara 2⁰52' sampai 3⁰5' Lintang Selatan dan 104⁰37' sampai 104⁰52' Bujur Timur. Pada tahun 2007, Kota Palembang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, telah terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II. Atas dasar itu, maka saat ini administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Kota Palembang adalah 352,51 km² / 35.200 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (49,64 km²) dan Kecamatan Ilir Barat Dua merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (47,23 km²). Berikut dapat dilihat luas wilayah Kota Palembang menurut kecamatan pada tabel dan gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan
 Sumber : Kota Palembang Dalam Angka, BPS Kota Palembang (2023)

Adapun peta administrasi kota Palembang berdasarkan kecamatan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2 Peta administrasi di kota Palembang
 Sumber : Kota Palembang Dalam Angka, BPS Kota Palembang (2023)

Berdasarkan Kota Palembang Dalam Angka, BPS Kota Palembang (2021) maka dijelaskan bahwa sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020.

Penduduk Kota Palembang berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 (September) sebanyak 1.668.848 jiwa yang terdiri atas 837.031 jiwa penduduk laki-laki dan 831.817 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,63 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Tahun 2022 Penduduk Palembang sebesar 1.729.546 jiwa yang terdiri atas 865.942 jiwa penduduk laki-laki dan 863.604 jiwa penduduk perempuan. besarnya rasio jenis kelamin 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki sama besar dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut dapat dilihat tabel jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kota Palembang pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Kota Palembang

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ilir Barat Dua	34 137	33 889	68 026
Gandus	39 919	38 803	78 722
Seberang Ulu Satu	47 105	45 908	93 013
Kertapati	47 917	46 240	94 157
Jakabaring	46 655	45 591	92 246
Seberang Ulu Dua	51 117	50 328	101 445
Plaju	48 234	48 327	96 561
Ilir Barat Satu	71 754	72 601	144 355
Bukitkecil	19 158	19 546	38 704
Ilir Timur Satu	32 250	34 122	66 372
Kemuning	40 109	40 825	80 934
Ilir Timur Dua	42 712	43 012	85 724
Kalidoni	64 340	64 123	128 463
Ilir Timur Tiga	36 851	36 385	73 236
Sako	58 667	59 546	118 213
Sematangborang	31 524	31 014	62 538
Sukarami	98 523	98 229	196 752
Alang-Alang Lebar	54 970	55 115	110 085
Palembang	865 942	863 604	1 729 546

Sumber : Kota Palembang Dalam Angka. BPS Kota Palembang (2021)

B. METODE PELAKSANAAN

Secara umum metode pada suatu penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara- cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis

(Sugiyono, 2018).

Metode kajian yang digunakan ialah metode penelitian campuran (Kualitatif dan Kuantitatif). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Lebih lanjut, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

Pada dasarnya, kajian pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*) pada umumnya terdiri atas beberapa proses, yaitu mengumpulkan data, mengorganisasikannya, menyimpan, kemudian diproses, lalu ditampilkan sebagai informasi dalam dokumen kajian, dokumen perencanaan dan dalam format yang beragam (teks, video, suara, dsb) yang digunakan untuk tujuan tertentu. Adapun karakteristik dari perencanaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. *Input data*: data yang telah dikumpulkan dilakukan proses input data untuk diproses lebih lanjut ke tahap selanjutnya.
2. Analisis data: dilakukan proses analisis data dengan cara yang beranekaragam untuk menjawab sasaran yang menjadi fokus di dalam kajian ini.
3. *Output data*: menghasilkan luaran yang dapat menjawab tujuan dan sasaran dari kajian ini, yaitu pemetaan potensi pengembangam UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*)

C. PERSIAPAN

Pada tahapan ini dilakukan persiapan pekerjaan, baik yang menyangkut persiapan administratif maupun persiapan teknis. Persiapan teknis meliputi kegiatan mobilisasi personil dan koordinasi tim kerja yang akan dilibatkan dalam keseluruhan pekerjaan, penajaman metode dan rencana kerja, penyiapan perangkat survei, serta pengumpulan data awal. Secara rinci, pokok pekerjaan dan hasil kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Administrasi

Pada tahapan persiapan ini dilakukan pengurusan surat-menyurat dan dokumen sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jenis surat yang diperlukan pada tahap ini berupa surat tugas konsultan dan surat pengantar dari pihak Pemberi Kerja maupun Konsultan, yang ditujukan untuk instansi terkait dan berwenang di wilayah studi. Pelaksanaan pengurusan administrasi dimaksudkan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan, terutama berkaitan dengan pengumpulan data dan pekerjaan di lapangan.

2. Mobilisasi Personil, Peralatan, dan Koordinasi Tim Kerja

Pada tahapan ini diawali dengan mempersiapkan peralatan, tenaga ahli dan kegiatan koordinasi/diskusi antara tenaga ahli yang terlibat dalam tim kerja konsultan. Penyiapan peralatan kantor yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan berupa komputer, printer, ATK dan sebagainya. Tenaga ahli yang akan dilibatkan harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan (bidang keahlian, kualifikasi personil, dan pengalaman kerja). Penentuan personil yang akan dilibatkan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang dapat diberikan sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung

secara efektif dan efisien. Pada tahap awal, kegiatan koordinasi tim kerja konsultan bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara matang dan rinci, berkaitan dengan proses pekerjaan yang akan dilakukan. Kegiatan ini meliputi penyusunan organisasi kerja, penyusunan rencana kerja, pembagian kerja, serta kebutuhan fasilitas pendukung yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap selanjutnya kegiatan koordinasi dan diskusitim kerja akan dilakukan secara berkelanjutan (selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung) ,untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan.

3. Penajaman metode dan rencana kerja

Pada tahapan ini bertujuan untuk menajamkan rencana/metodologi pelaksanaan pekerjaan, sebagai suatu pegangan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini. Rumusan rencana kerja ini secara garis besar meliputi detail kegiatan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, pelibatan dan jadwal penugasan tenaga ahli, serta keluaran pekerjaan yang harus dihasilkan.

4. Penyiapan perangkat survei

Sebagai langkah awal pelaksanaan survei lapangan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya, terlebih dahulu dilakukan beberapa persiapan yang diperlukan agar pelaksanaan survey dapat berjalan dengan lancar. Persiapan yang dilakukan antara lain meliputi perumusan desain survei, daftar kebutuhan data dan instansi sumber data/informasi, penyiapan personil (surveyor) dan peralatan survei yang akan digunakan dalam kegiatan lapangan.

5. Pengumpulan data awal

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sekunder awal akan dilakukan dengan mengumpulkan laporan perencanaan, hasil studi, kebijakan, yang terkait dengan lokasi pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung serta peta dasar yang tersedia dari instansi terkait.

6. Studi Pustaka

Studi pustaka, berupa studi kepustakaan terhadap bahan-bahan awal yang telah diperoleh dari pengumpulan data awal yang berkaitan dengan substansi pekerjaan. Studi pustaka/literatur meliputi kajian terhadap literatur umum maupun kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Maksudnya adalah untuk meningkatkan pemahaman konsultan mengenai substansi pekerjaan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait sebagai sumber data, seperti: Bappeda, BPS, kantor/instansi lainnya yang diidentifikasi sebagai sumber penyedia data sekunder. Disamping itu pengumpulan data sekunder juga dapat dilakukan dengan mengunjungi *web site* lembaga/instansi sumber data dan informasi. Bentuk data sekunder dapat berupa lembaran surat peraturan, dokumen perencanaan, peta-peta tematik, dan data statistik baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Hal penting yang perlu diperhatikan dari data sekunder ini adalah akurasi dan validitasnya. Diupayakan untuk mendapatkan data dengan akurasi dan validitas tinggi. Sedangkan data atribut disesuaikan dengan kebutuhan identifikasi kegiatan atau pembangunan, yaitu dengan menggunakan data hasil validasi dari laporan pelaksanaan kegiatan maupun dari dokumen lain yang terkait.

2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada kajian ini. Adapun teknik pengumpulan data primer yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Kuesioner atau angket

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dalam hal ini berkaitan dengan variabel yang telah dirumuskan pada kajian ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur.

2. Survei lapangan

Untuk melakukan *ground check* terhadap pelaksanaan kegiatan/pembangunan untuk melakukan verifikasi data. Survei lapangan dimaksudkan untuk merekam kondisi yang ada di lokasi. Rekaman yang dilakukan oleh surveyor antara lain meliputi kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaannya, perkembangan terkini dari kegiatan tersebut serta mencatat permasalahan yang mungkin ada (wawancara). Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari pengamatan langsung di lapangan, kunci utama

berada pada kemampuan dan kepekaan surveyor merekam hal-hal penting yang diperlukan sebagai data dan informasi.

E. TEKNIK ANALISIS

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis, yaitu (1) survey sistem, (2) analisis terstruktur yang secara garis besar untuk memperoleh pengertian dari permasalahan-permasalahan, efisiensi dan pertimbangan-pertimbangan yang mengarah pada pemetaan potensi pengembang UMKM dan industri berbasis keluarga, (3) analisis SWOT, (4) analisis kelayakan, dan (5) analisis ekstrapolasi. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Sistem

Kegiatan pada tahap survei pengumpulan data ini adalah mengumpulkan informasi dan data selengkap-lengkapny mengenai:

- a. Sistem dan Prosedur: Tim survei akan menjaring konsep kerja/sistem dan prosedur pengelolaan data dari sistem yang berjalan sekarang ini.
- b. Data dan Informasi: Pengumpulan informasi mengenai proses pengolahan data hasil kegiatan, serta mengklasifikasikan seluruh jenis data dan menyampaikan konsep mekanisme *flow of data*.
- c. Permasalahan: Mengumpulkan informasi mengenai kendala- kendala yang berhubungan dengan sistem perencanaan.
- d. Sarana: Mengumpulkan data mengenai sarana utama maupun penunjang yang telah tersedia guna mendukung

sistem yang terintegrasi. Selain melaksanakan survei untuk pengumpulan data dan informasi, juga akan dilaksanakan studi-studi literatur dan peraturan-peraturan yang terkait. Setelah hasil pengumpulan data ini diperoleh kemudian akan didiskusikan dengan pihak konsumen untuk pemaparan hasil studi guna penyesuaian/konfirmasi dan menambahkan masukan. Adapun data yang akan dikumpulkan dan diinventarisasi adalah data-data fisik lapangan. Pada tahap ini akan diperiksa kelengkapan data kondisi lapangan yang sangat diperlukan dalam proses analisis.

2. Analisis terstruktur

Pada tahap ini tim studi akan menganalisis bahan masukan yang telah diperoleh dari hasil survei. Analisis terhadap hasil survei tersebut terbagi dalam beberapa jenis analisis, yaitu

- a. Analisis sistem dan prosedur: Analisis pada tahap ini bertujuan untuk mempelajari hasil studi dan bersama tim ahli menyusun suatu sistem dan prosedur tentang pengumpulan dan pengelolaan data .
- b. Analisis sistem informasi: Tujuan analisis sistem informasi ini adalah mempelajari dan menyusun konsep sistem pengelolaan data dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dan mudah dioperasikan serta menjamin terhadap kualitas dan kuantitas serta keamanan terhadap informasi yang dihasilkan.
- c. Analisis sarana pendukung: Analisis sarana pendukung yang dimaksud di sini adalah mempelajari, memilih dan memberikan alternatif saran pendukung yang berhubungan dengan pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga. Pada tahap analisis ini yang paling

penting dilakukan adalah menentukan dan merumuskan informasi apa saja yang akan disajikan-terutama terkait dengan informasi mengenai pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga.

3. Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2018) analisis statistik deskriptif yang berwawasan luas adalah informasi faktual yang berguna untuk memberikan ringkasan atau survei temuan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai tujuan akhir. Tinjauan ekspresif harus diisi sebagai deskripsi atau penjelasan elemen inti melalui contoh informasi dan informasi dari responden yang menerima informasi, dan melihat tabel umum atau tabel berulang seperti bagan, grafik, piktogram, dll. hasil yang menunjukkan hasil dengan memperkenalkan mereka. Estimasi memakai varians mode, mean, mean, dan varians grup.

Tanggapan terhadap survei yang disesuaikan dengan uji dilengkapi dengan penyelidikan yang jelas untuk menemukan gambaran umum yang terfokus dengan mengamati penyebaran tanggapan responden. Analisis deskriptif ini dimungkinkan oleh standar seperti: ketentuan skor 5 (sangat setuju), skor 4 (setuju), skor 3 (kurang setuju), skor 2 (tidak setuju), dan skor 1 (sangat tidak setuju).

4. Analisis SWOT

SWOT adalah *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Kekuatan merupakan sumber daya yang melindungi dari persaingan dan menciptakan kemajuan dalam suatu usaha, Kelemahan merupakan potensi sumber daya tidak dapat bersaing dan tidak dapat menciptakan suatu kemajuan dalam suatu usaha atau kegiatan,

Peluang merupakan lingkungan yang dapat memungkinkan usaha atau kegiatan mendapatkan keberhasilan, ancaman merupakan lingkungan yang dapat menghalangi suatu kegiatan apabila tidak ada tindakan pengelolaan yang tegas (wibowo,1987).

Pada kajian pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga perlu dirumuskan strategi pemetaan yang baik, sehingga pemilihan analisis SWOT dalam kajian ini merupakan hal yang tepat. Analisis SWOT terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan peluang dan ancaman.

Alat analisis yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor Strategis merupakan matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis. Matriks SWOT ini digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi pada empat kuadran yang paling berkait dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ada empat strategi utama yang dirumuskan berdasarkan matrik SWOT:

- a. Strategi SO Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Strategi ST Ciptakan Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- d. Strategi WT Ciptakan Strategi meminimalkan Kelemahan dan menghindari ancaman

5. Analisis Keruangan

Pendekatan keruangan sebagai basis analisis kajian khususnya untuk menganalisis aspek-aspek keruangan pada lokasi kajian. Adapun pendekatan keruangan yang digunakan di dalam penelitian ialah: analisis pola keruangan, analisis interaksi keruangan (Yunus, 2017). Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan di dalam analisis pola keruangan, meliputi: mengabstraksikan objek kajian, mengklasifikasikan sebaran, dan menjawab pertanyaan geografis (Yunus, 2017: 50-56).

F. RENCANA KERJA

1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kajian pemetaan potensi pengembangam UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*) tahun anggaran 2023 dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) hari kalender atau 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Untuk itu, jadwal kegiatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dalam jadwal kegiatan ini pada prinsipnya akan diuraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan.

2. Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan kajian pemetaan potensi pengembangam UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*) dilakukan dengan melibatkan beberapa organisasi pelaksanaan pekerjaan. Oleh sebab itu, maka konsultan menyusun organisasi pelaksana dengan melibatkan beberapa tenaga ahli dan tenaga pendukung dari berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan ruang lingkup

kegiatan dari pekerjaan tersebut. Dengan demikian, meskipun melibatkan beberapa tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu tetapi dengan mengacu pada ruang lingkup kegiatannya, maka masing-masing tenaga ahli yang diusulkan akan memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab. Adapun kriteria kebutuhan personil dalam kajian pemetaan potensi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga sebagai berikut:

- a. Team Leader : Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota sebanyak 1 orang sebagai tim leader yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Strata 1 (satu) Perencanaan Wilayah dan Kota serta memiliki pengalaman 2 (dua) tahun dalam melaksanakan kajian pengembangan wilayah.
- b. Ahli ekonomi sebanyak 1 orang sebagai tenaga ahli yang memiliki latar belakang Strata 1 (satu) sarjana ekonomi semua jurusan yang memiliki pengalaman 1 tahun.
- c. Ahli ilmu sosial sebanyak 1 orang tenaga ahli yang memiliki latar belakang Strata 1 (satu) sarjana ilmu sosial semua jurusan yang memiliki pengalaman 1 tahun.
- d. Sarjana tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh tenaga penunjang yang dibutuhkan, seperti tenaga administrasi dan petugas lapangan yang melakukan survey yang kesemuanya setidaknya memiliki latar pendidikan SMA/SMK sederajat.

3. Pelaporan

Adapun sistem pelaporan pekerjaan pemetaan potensi pengembangam UMKM dan industri berbasis keluarga (*home industry*) terdiri atas:

- a. Laporan Pendahuluan
Penyusunan Laporan Pendahuluan harus mencangkup semua gambaran yang jelas tentang lingkup pekerjaan dan juga

metodologi dan pendekatan teknis. Selain itu juga harus mencangkup rencana pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini harus diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah keluarnya Surat Perintah Kerja.

b. **Laporan Antara**

Penyusunan Laporan Antara harus mencangkup kajian literatur dan studi terdahulu, data hasil pelaksanaan survei dan konklusi sementara yang dapat dihasilkan dari data yang ada. Laporan ini harus diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keluarnya Surat Perintah Kerja.

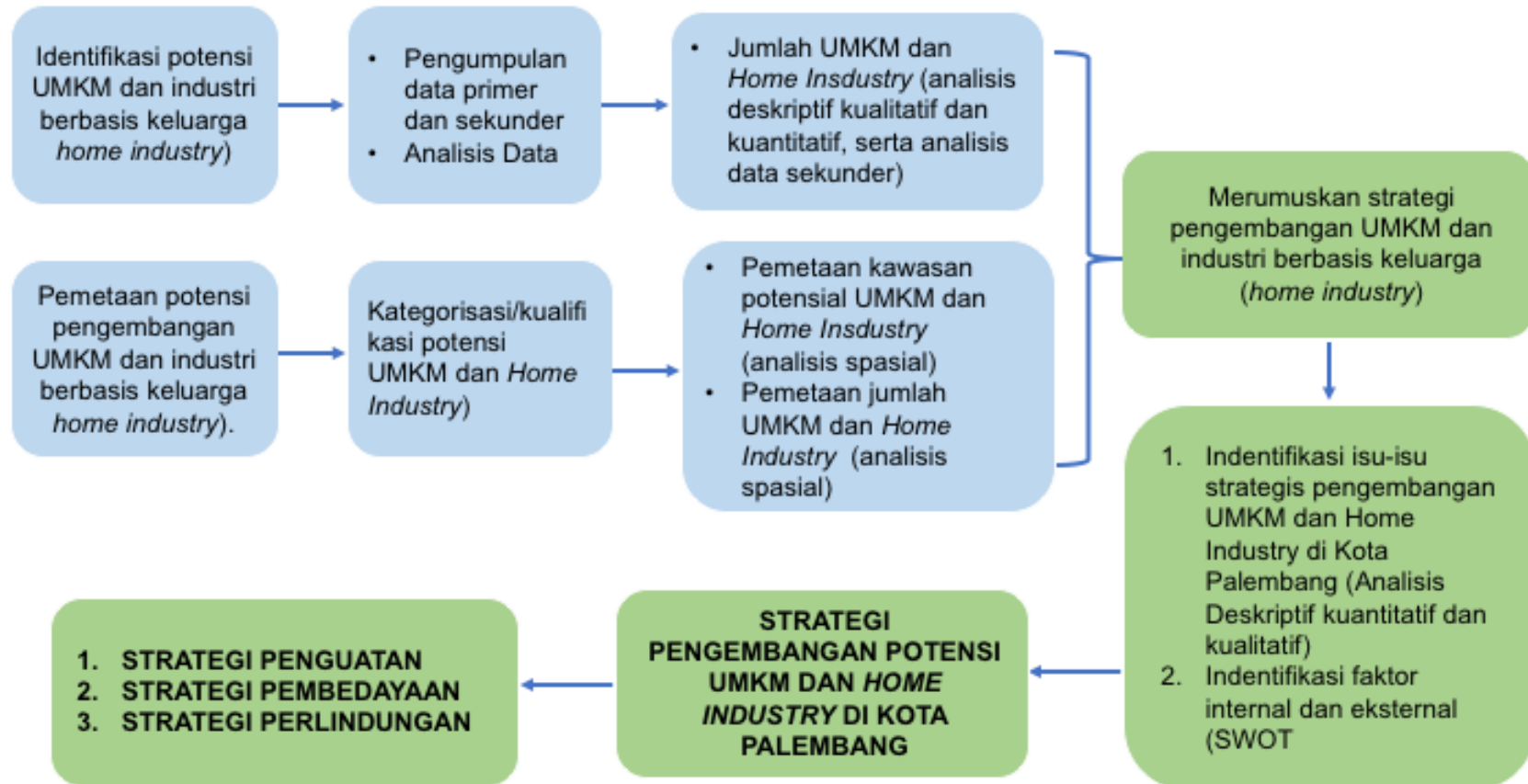
c. **Laporan Akhir**

Laporan ini merupakan hasil akhir setelah melakukan paparan di stakeholder, Laporan ini harus diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah keluarnya Surat Perintah Kerja.

d. **Softcopy Laporan**

Softcopy ini merupakan file laporan berupa Harddisk yang diserahkan sebanyak 1 (satu) buah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah keluarnya Surat Perintah Kerja.

G. KERANGKA PIKIR KAJIAN



Gambar 3.3 Kerangka Pikir Kajian

F. KEBUTUHAN DATA

Tabel 3.2 Kebutuhan data

No	Sasaran Kajian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	OPD Terkait
1	Identifikasi kondisi eksisting keberadaan UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang (per Kecamatan) di Kota Palembang - Identifikasi potensi UMKM dan Home Industry berdasarkan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis usaha yang dijalankan b. Bentuk usaha yang dijalankan c. Lokasi usaha d. Tahunan mulai usaha e. Perizinan usaha f. Jenis usaha yang dimiliki g. Jumlah pegawai h. Partisipasi bimbingan teknis i. Jenis bimbingan teknis j. Penyelenggara bimbingan teknis k. Administrasi usaha yang digunakan l. Pemasaran produk m. Kendala yang dihadapi n. Total aset bersih o. Total penjualan 	Primer dan Sekunder	Kajian literature (sekunder), kuesioner, observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Perdagangan Kota Palembang - Dinas Perindustrian Kota Palembang
2	Pemetaan potensi pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang (per Kecamatan) → 	Primer dan Sekunder	Kajian literature (sekunder),	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Kajian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	OPD Terkait
	UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang	<p>klasifikasi berdasarkan 3 kelompok (tinggi, sedang, rendah)</p> <p>- Jenis UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang → klasifikasi berdasarkan 3 kelompok UMKM dan <i>Home Industry</i> yang paling dominan atau banyak di Kota Palembang (jenis usaha)</p>		kuesioner, observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan Kota Palembang - Dinas Perindustrian Kota Palembang
3	Strategi dan program pengembangan UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Isu strategis terkait pengembangan UMKM dan <i>Home Industry</i> di Kota Palembang, terdapat beberapa informasi yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> a. Modal b. Pemasaran c. Peralatan d. Produk e. Perizinan f. Pelatihan g. SDM h. Bahan Baku i. Akses Jalan j. Harga k. Kompetitor (daya saing) l. Inovasi m. Lokasi n. Kemitraan o. Regulasi Kebijakan p. Branding dan Hak Paten 	Primer dan Sekunder	Kajian literature (sekunder), kuesioner, observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Perdagangan Kota Palembang - Dinas Perindustrian Kota Palembang

No	Sasaran Kajian	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	OPD Terkait
		q. Mutu r. Garansi s. Sasaran / Target Pasar t. Perencanaan u. Kemasan v. Manajemen (Administrasi)			

Hasil Analisi, 2023

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. MENGIDENTIFIKASI KONDISI EKSISTING KEBERADAAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (*HOME INDUSTRY*)

Berdasarkan kondisi eksistinya, keberadaan UMKM dan industri berbasis keluarga tersebar secara merata di setiap kecamatan di Kota Palembang. Pada dasarnya industri berbasis keluarga dapat dikategorikan ke dalam bagian dari UMKM, sehingga hasil dari kondisi eksistinya dikelompokkan secara keseluruhan ke dalam kelompok UMKM di Kota Palembang. Mengacu pada **PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah**, maka dapat ditegaskan **terdapat beberapa kriteria untuk mengidentifikasi keberadaan UMKM di Kota Palembang**. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kriteria berdasarkan modal usaha
 - Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kriteria berdasarkan hasil penjualan (omzet) tahunan
 - Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan

- paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
 - Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Dengan mengacu pada kriteria hasil penjualan atau omzet tahunan, maka dapat diketahui jumlah UMKM di Kota Palembang per Desember 2022 sebanyak 80.627 UMKM (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, 2022). Secara rinci, berikut diidentifikasi jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan atau omzet tahunan.

1. Identifikasi Jumlah Usaha Mikro di Kota Palembang

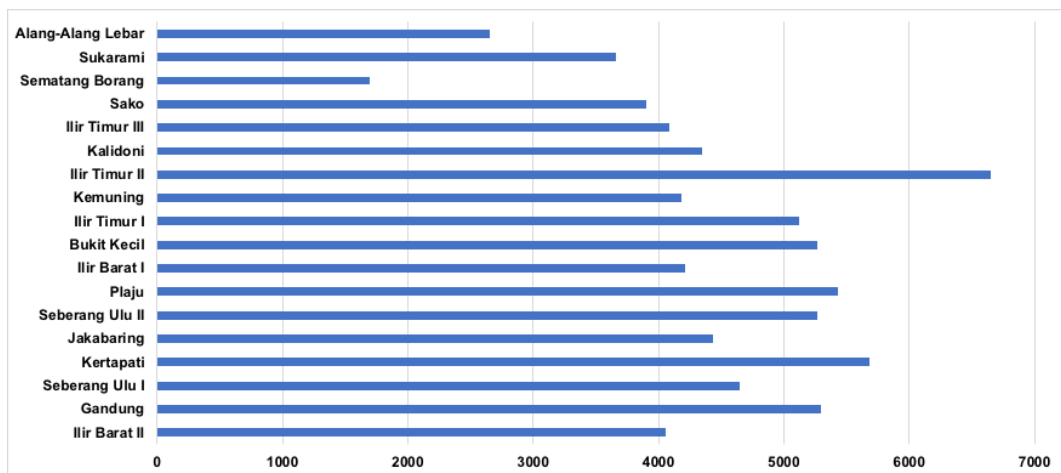
Jumlah usaha mikro di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau omzet tahunan dimulai dari 0 sampai dengan < 2M sebanyak 80.563 usaha mikro yang tersebar secara merata di setiap kecamatan di Kota Palembang. Kecamatan dengan jumlah usaha mikro paling tinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur II dengan jumlah sebanyak 6.650 usaha mikro, sedangkan kecamatan dengan jumlah usaha mikro paling rendah ialah Kecamatan Sematang Borang dengan jumlah sebanyak 1.695 usaha mikro. Berikut dapat dilihat tabel dan diagram jumlah usaha mikro berdasarkan hasil penjualan atau omzet tahunan di Kota Palembang:

Tabel 4.1 Jumlah Usaha Mikro di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan

No	Kecamatan	Usaha Mikro (<2m)
1	Ilir Barat II	4.056
2	Gandus	5.293

No	Kecamatan	Usaha Mikro (<2m)
3	Seberang Ulu I	4.650
4	Kertapati	5.680
5	Jakabaring	4.434
6	Seberang Ulu II	5.265
7	Plaju	5.426
8	Ilir Barat I	4.215
9	Bukit Kecil	5.262
10	Ilir Timur I	5.118
11	Kemuning	4.181
12	Ilir Timur II	6.650
13	Kalidoni	4.342
14	Ilir Timur III	4.086
15	Sako	3.897
16	Sematang Borang	1.695
17	Sukarami	3.657
18	Alang-Alang Lebar	2.656
Jumlah		80.563

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang per Desember 2022



Gambar 4.1 Diagram jumlah Usaha Mikro di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan Hasil olahan, 2023

2. Identifikasi Jumlah Usaha Kecil di Kota Palembang

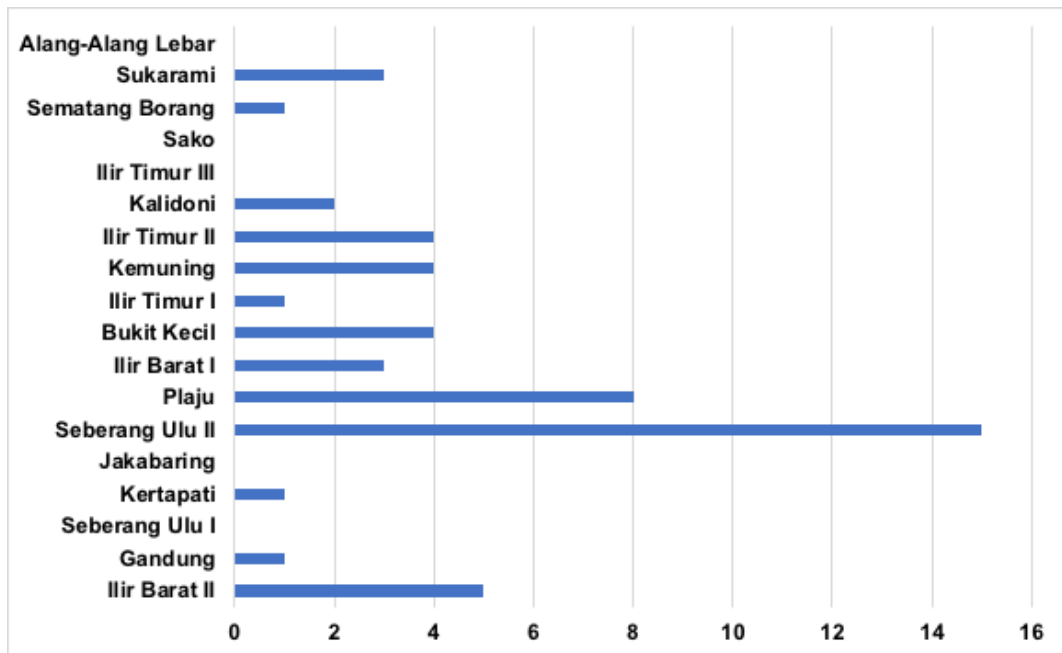
Jumlah usaha kecil di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau

omzet tahunan dimulai dari 2M sampai dengan 15M sebanyak 52 usaha mikro yang terdapat di 13 kecamatan selain Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Ilir Timur III, Sako, dan Sukarami. Kecamatan dengan jumlah usaha kecil terbanyak terdapat di Kecamatan Seberang Ulu II sebanyak 15 usaha kecil, sedangkan Kecamatan dengan jumlah usaha kecil paling rendah dengan jumlah usaha kecil sebanyak 0 usaha kecil (tidak ada) terdapat di Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Ilir Timur III, Sako, dan Sukarami. Berikut dapat dilihat tabel dan diagram jumlah usaha kecil berdasarkan hasil penjualan atau omzet tahunan di Kota Palembang:

Tabel 4.2 Jumlah Usaha Kecil di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan

No	Kecamatan	Usaha Mikro
1	Ilir Barat II	5
2	Gandus	1
3	Seberang Ulu I	0
4	Kertapati	1
5	Jakabaring	0
6	Seberang Ulu II	15
7	Plaju	8
8	Ilir Barat I	3
9	Bukit Kecil	4
10	Ilir Timur I	1
11	Kemuning	4
12	Ilir Timur II	4
13	Kalidoni	2
14	Ilir Timur III	0
15	Sako	0
16	Sematang Borang	1
17	Sukarami	3
18	Alang-Alang Lebar	0
Jumlah		52

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang per Desember 2022



Gambar 4.2 Diagram Jumlah Usaha Kecil di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan Hasil olahan, 2023

3. Identifikasi Jumlah Usaha Menengah di Kota Palembang

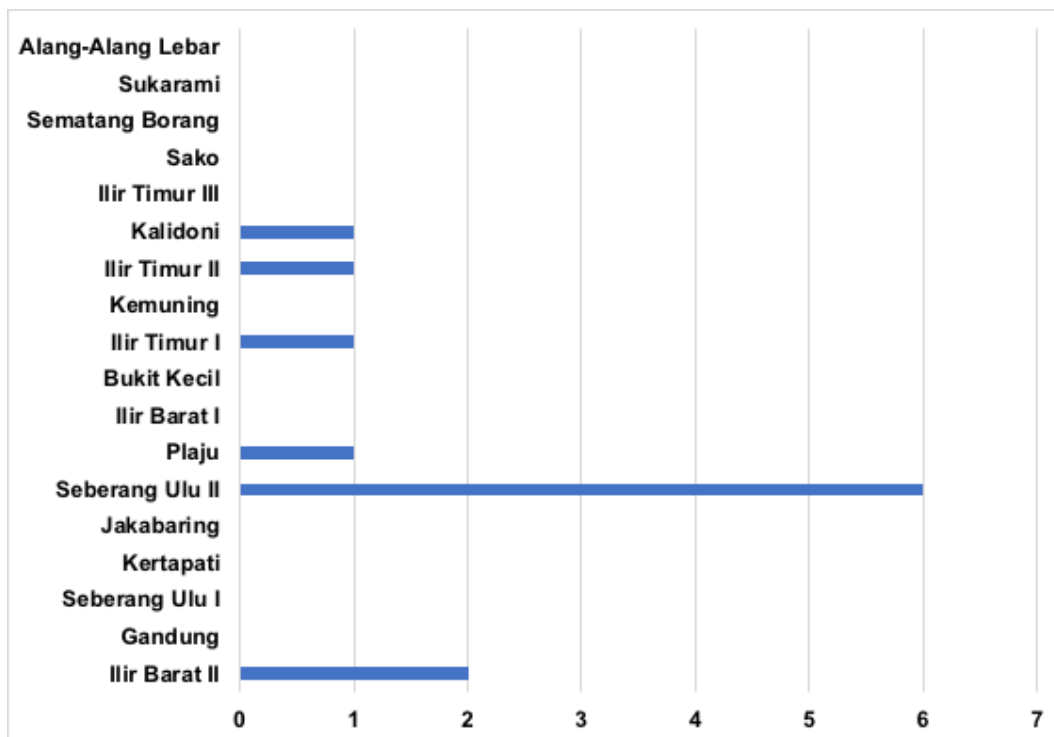
Jumlah usaha menengah di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau omzet tahunan dimulai dari 15M sampai dengan 50M sebanyak 12 usah menengah. Kecamatan dengan jumlah usaha menengah paling tinggi terdapat di Kecamatan Seberang Ulu II, sedangkan kecamatan dengan jumlah usaha menengah sebanyak 0 usaha kecil (tidak ada) terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Timur I, Kemuning, dan Kalidoni. Berikut dapat dilihat tabel dan diagram jumlah usaha menengah berdasarkan hasil penjualan atau omzet tahunan di Kota Palembang:

Tabel 4.3 Jumlah Usaha Menengah di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan

No	Kecamatan	Usaha Mikro
1	Ilir Barat II	2
2	Gandus	0
3	Seberang Ulu I	0
4	Kertapati	0

No	Kecamatan	Usaha Mikro
5	Jakabaring	0
6	Seberang Ulu II	6
7	Plaju	1
8	Ilir Barat I	0
9	Bukit Kecil	0
10	Ilir Timur I	1
11	Kemuning	0
12	Ilir Timur II	1
13	Kalidoni	1
14	Ilir Timur III	0
15	Sako	0
16	Sematang Borang	0
17	Sukarami	0
18	Alang-Alang Lebar	0
Jumlah		12

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang per Desember 2022



Gambar 4.3 Diagram jumlah Usaha Menengah di Kota Palembang berdasarkan hasil penjualan Hasil olahan, 2023

4. Identifikasi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang

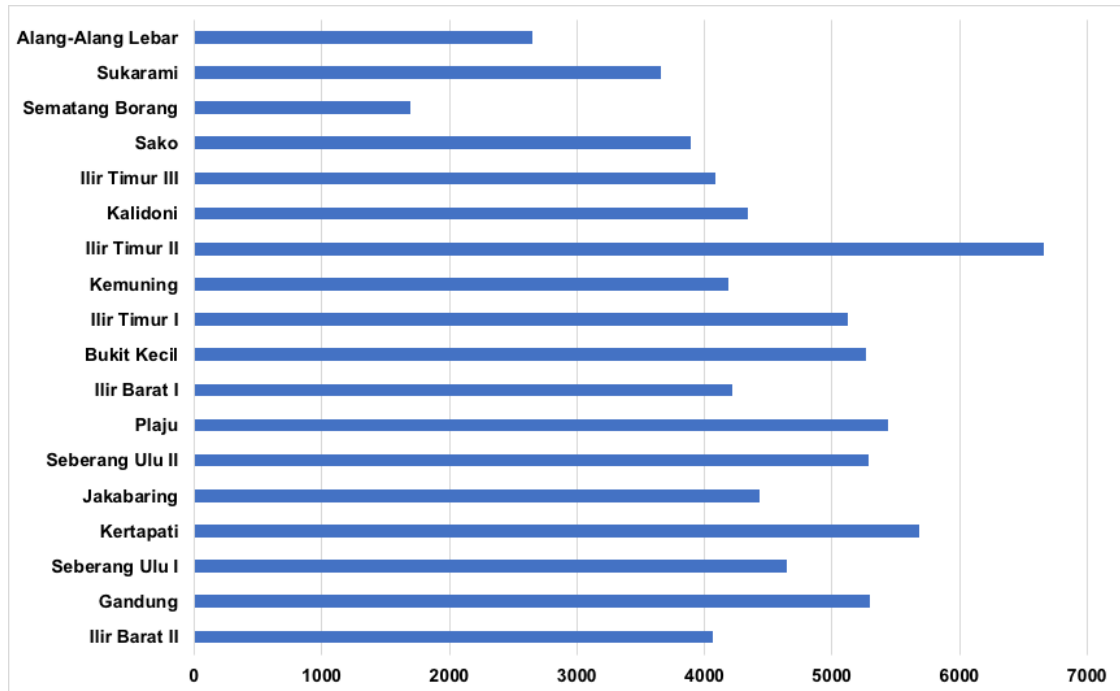
Berdasarkan identifikasi jumlah UMKM di Kota Palembang dengan melihat hasil penghasilan atau omzet tahunan, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan UMKM di Kota Palembang tersebar secara merata di Kota Palembang di setiap kecamatan. Hasil identifikasi tersebut merupakan hasil pemutahiran data terkait jumlah UMKM yang terdapat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang per Desember 2022 dengan jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 80.627 UMKM. Kecamatan dengan jumlah UMKM paling tinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur II, sedangkan kecamatan dengan jumlah UMKM paling rendah terdapat di Kecamatan Sematang Borang. Berikut dapat dilihat tabel dan diagram jumlah UMKM berdasarkan total hasil penjualan di Kota Palembang:

Tabel 4.4 Jumlah UMKM berdasarkan total hasil penjualan Kota Palembang tahun 2022

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1	Ilir Barat II	4.056	5	2	4.063
2	Gandus	5.293	1	0	5.294
3	Seberang Ulu I	4.650	0	0	4.650
4	Kertapati	5.680	1	0	5.681
5	Jakabaring	4.434	0	0	4.434
6	Seberang Ulu II	5.265	15	6	5.286
7	Plaju	5.426	8	1	5.435
8	Ilir Barat I	4.215	3	0	4.218
9	Bukit Kecil	5.262	4	0	5.266
10	Ilir Timur I	5.118	1	1	5.120
11	Kemuning	4.181	4	0	4.185
12	Ilir Timur II	6.650	4	1	6.655
13	Kalidoni	4.342	2	1	4.345
14	Ilir Timur III	4.086	0	0	4.086
15	Sako	3.897	0	0	3.897
16	Sematang Borang	1.695	1	0	1.696

17	Sukarami	3.657	3	0	3.660
18	Alang-Alang Lebar	2.656	0	0	2.656
Jumlah		80.563	52	12	80.627

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Per Desember 2022



Gambar 4.4 Diagram jumlah UMKM berdasarkan total hasil penjualan di Kota Palembang tahun 2022 Hasil olahan, 2023

5. Identifikasi Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang di Kota Palembang Berdasarkan SPPIRT dan NIB Kategori Pangan

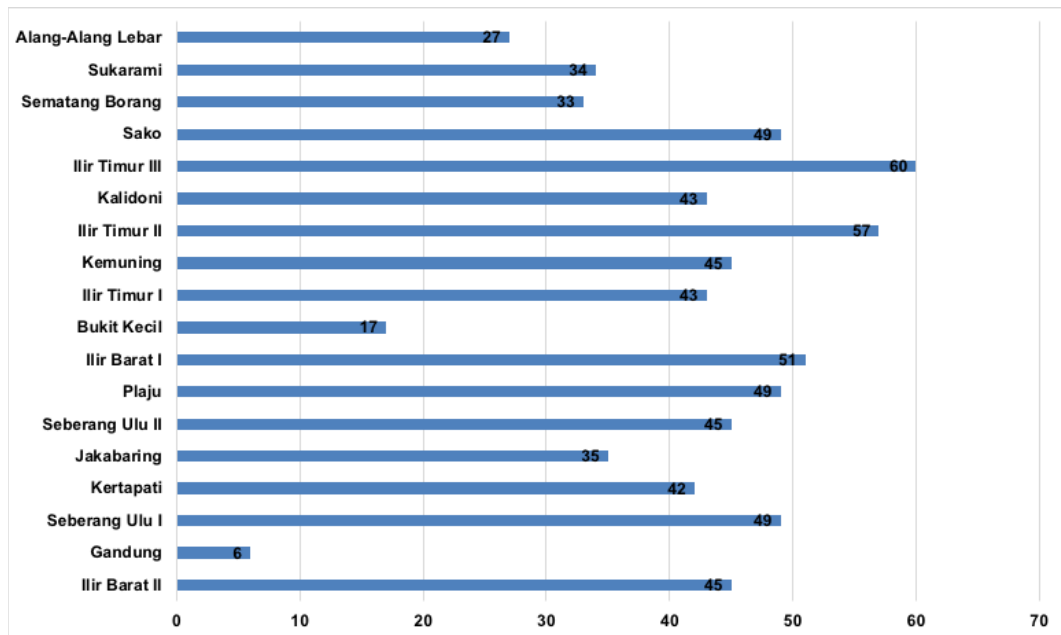
Berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan yang dilihat berdasarkan jenis pangan, maka dapat identifikasi sebanyak 730 UMKM dan industri berbasis keluarga yang telah mempunyai SPPIRT dan NIB. Adapun jenis pangan dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang seperti produk olahan hasil perikanan, tepung dan hasil olahannya, hasil olahan biji-bijian/kacang/umbi-umbian, gula/kembang gula/permen/coklat, bumbu, kopi dan teh kering, hasil olahan daging kering, hasil olahan buah sayur, minuman serbuk dan botanical, hasil olahan unggas dan telur, dan minyak. Dari 730 jumlah UMKM dan industri

berbasis keluarga yang telah mempunyai SPPIRT dan NIB, maka dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling banyak mengurus SPPIRT dan NIB ialah Kecamatan Ilir Timur III yaitu sebanyak 60, lalu Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 51, dan dilanjutkan dengan Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 57. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah SPPIRT dan NIB yang paling sedikit ialah Kecamatan Gandus. Berikut dapat dilihat tabel dan diagram jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga Kota Palembang berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan.

Tabel 4.5 Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga Kota Palembang berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Ilir Barat II	45
2	Gandus	6
3	Seberang Ulu I	49
4	Kertapati	42
5	Jakabaring	35
6	Seberang Ulu II	45
7	Plaju	49
8	Ilir Barat I	51
9	Bukit Kecil	17
10	Ilir Timur I	43
11	Kemuning	45
12	Ilir Timur II	57
13	Kalidoni	43
14	Ilir Timur III	60
15	Sako	49
16	Sematang Borang	33
17	Sukarami	34
18	Alang-Alang Lebar	27
Jumlah		730

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palembang 2022



Gambar 4.5 Diagram jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga Kota Palembang berdasarkan SPPIRT dan NIB kategori pangan Hasil olahan, 2023

6. Identifikasi UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Berdasarkan Jumlah Responden

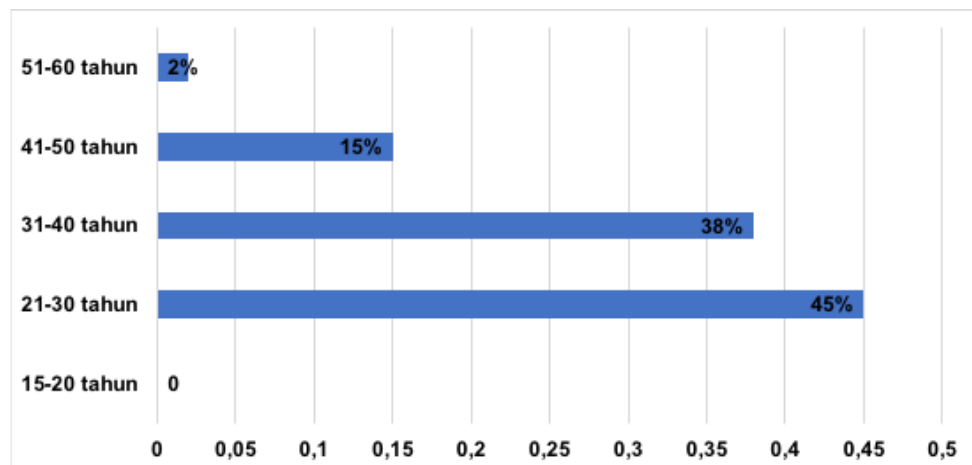
Berdasarkan jumlah UMKM di Kota Palembang sebanyak 80.627, maka untuk mengidentifikasi lebih lanjut terkait kondisi eksisting dari UMKM di Kota Palembang dilakukan penyebaran kuesioner secara random dengan jumlah responden sebanyak 100 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Palembang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (offline) maupun secara tidak langsung (online), sehingga diperoleh beberapa informasi yang dapat menunjang hasil identifikasi kondisi eksisting keberadaan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang. Terdapat beberapa informasi diidentifikasi kepada 100 responden tersebut, di antaranya: identitas pelaku UMKM (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan), jenis usaha, bentuk usaha yang dijalankan, lokasi usaha, tahunan mulai usaha, perizinan (kepemilikan NIB), jumlah pegawai, partisipasi bimbingan teknis, jenis bimbingan teknis, penyelenggara bimbingan teknis, administrasi usaha yang digunakan,

pemasaran, kendala yang dihadapi, total aset bersih, dan total penjualan. secara rinci, informasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Identifikasi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga**

- **Usia**

Dari 100 responden, sebanyak 45% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berusia 21 tahun sampai dengan 30 tahun. Lalu sebanyak 38% berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun, sebanyak 15% berusia 41 tahun sampai dengan 50 tahun, dan sisanya 2% berusia di atas 51 tahun. Berikut dapat dilihat diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan usia pada gambar di bawah ini:

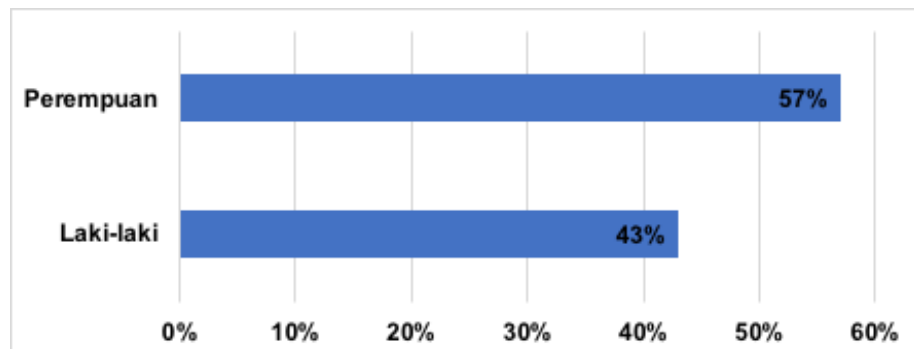


Gambar 4.6 Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan usia Hasil olahan, 2023

- **Jenis kelamin**

Dari 100 responden, sebanyak 57% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berjenis kelamin perempuan. Lalu sebanyak 43% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berjenis kelamin laki-laki. Berikut dapat dilihat diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis kelamin pada gambar di

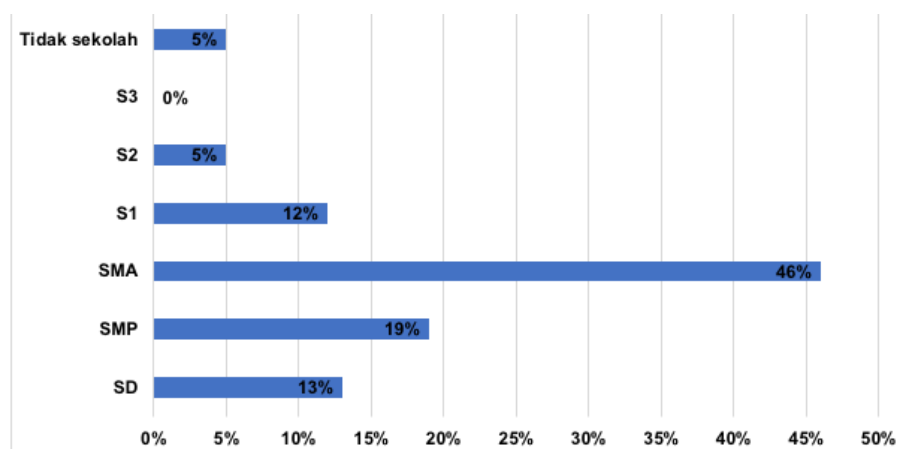
bawah ini:



Gambar 4.7 Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis kelamin
Hasil olahan, 2023

- **Tingkat pendidikan**

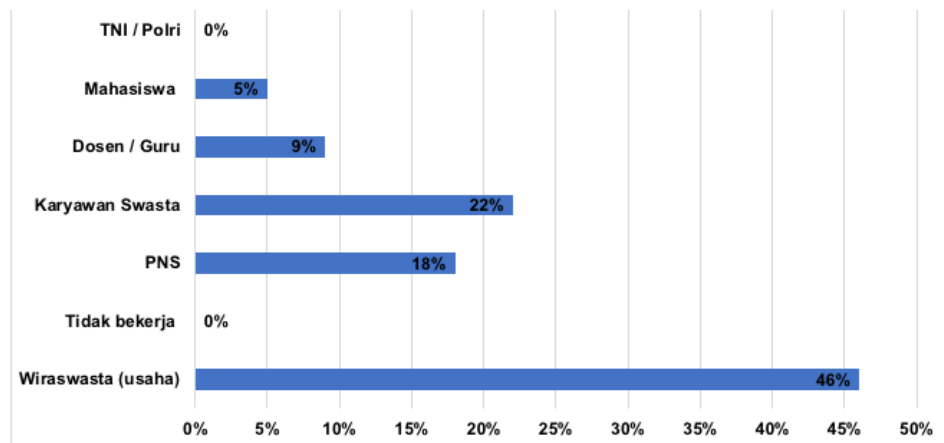
Dari 100 responden, sebanyak 46% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang dengan tingkat pendidikan SMA. Lalu sebanyak 19% dengan tingkat pendidikan SMP, sebanyak 13% dengan tingkat pendidikan SD, sebanyak 12% dengan tingkat pendidikan S1, sebanyak 5% dengan tingkat pendidikan S2, dan sisanya 5% dengan status tidak sekolah. Berikut dapat dilihat diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.8 Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan tingkat pendidikan
Hasil olahan, 2023

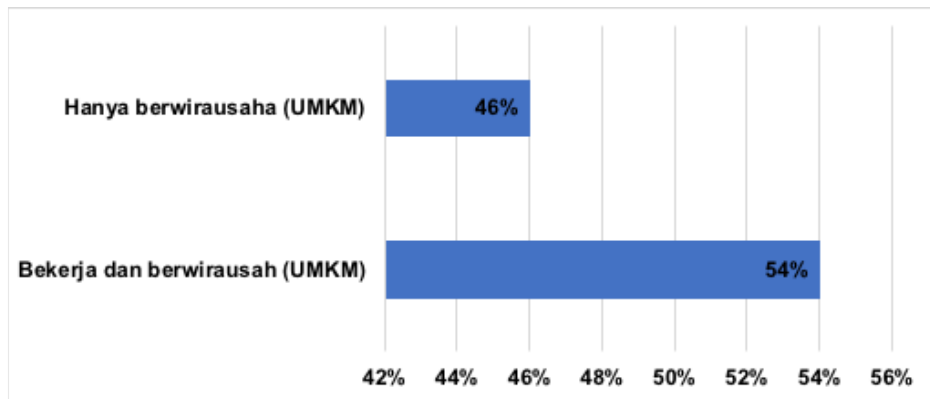
- **Pekerjaan**

Dari 100 responden, sebanyak 46% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang bekerja sebagai wiraswasta (usaha). Lalu sebanyak 22% bekerja sebagai karyawan swasta, sebanyak 18% bekerja sebagai PNS, sebanyak 9% bekerja sebagai Dosen/Guru, dan sisanya 5% dengan status sebagai Mahasiswa. Berikut dapat dilihat diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis pekerjaan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.9 Diagram pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berdasarkan jenis pekerjaan Hasil olahan, 2023

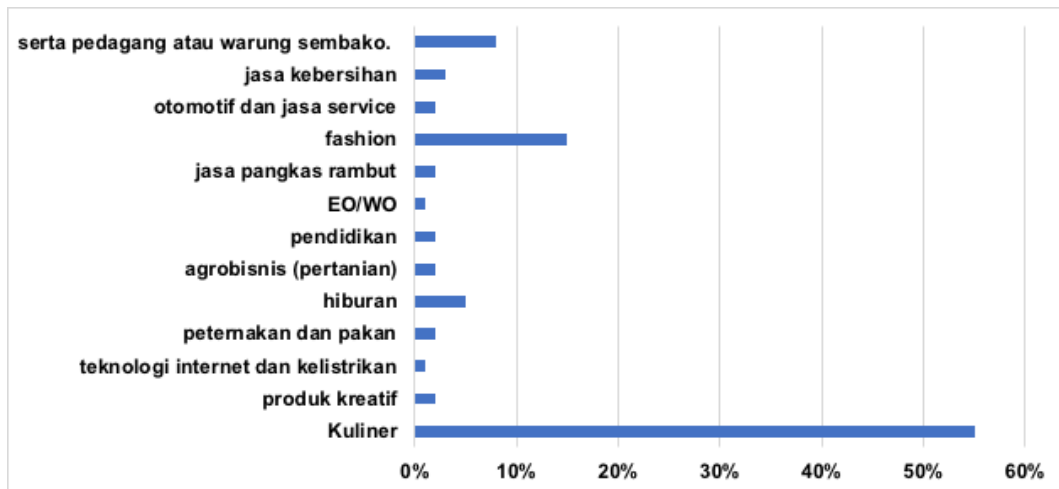
Berdasarkan jenis pekerjaan di atas sebanyak 46% responden menyatakan bahwa bekerja sebagai wiraswasta (usaha), hal tersebut sejalan dengan aktivitas usaha yang dijalankan sebagai pelaku UMKM di Kota Palembang. Sementara itu, 54% lainnya merupakan responden yang bekerja disuatu institusi di Kota Palembang namun juga menjalankan wiraswasta (usaha) sebagai pelaku UMKM di Kota Palembang. Berikut dapat dilihat diagram keterkaitan jenis pekerjaan dengan aktivitas usaha yang dijalankan (UMKM) pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.10 Diagram keterkaitan jenis pekerjaan dengan aktivitas usaha yang dijalankan (UMKM)
Hasil olahan, 2023

➤ **Identifikasi Jenis usaha yang dijalankan**

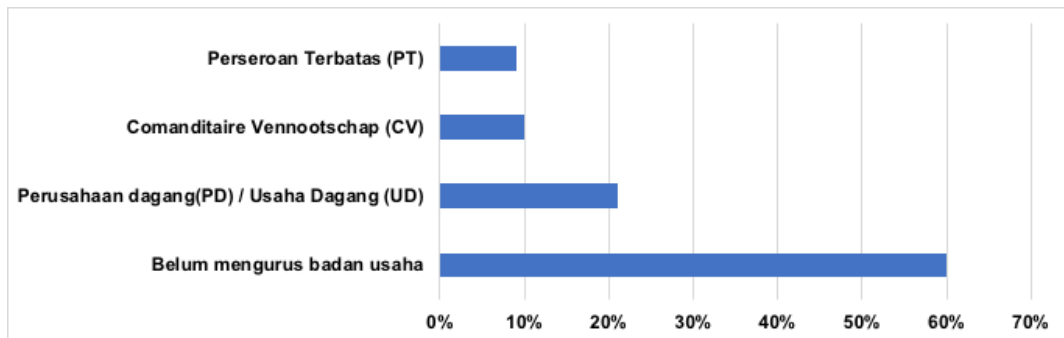
Terdapat beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, yaitu: kuliner, produk kreatif, teknologi internet dan kelistrikan, peternakan dan pakan, hiburan, agrobisnis (pertanian), pendidikan, EO/WO, jasa pangkas rambut, fashion, otomotif dan jasa service, jasa kebersihan, serta pedagang atau warung sembako. Dari 100 responden telah menyatakan bahwa sebanyak 55% pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang bergerak pada bidang kuliner, sebanyak 15% bergerak pada bidang fashion, sebanyak 8% sebagai pedagang / warung sembako, dan sisanya sebesar 22% pada jenis-jenis usaha yang dijalankan lainnya. Berikut dapat dilihat diagram persentase jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.11 Diagram persentase jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Bentuk usaha yang dijalankan**

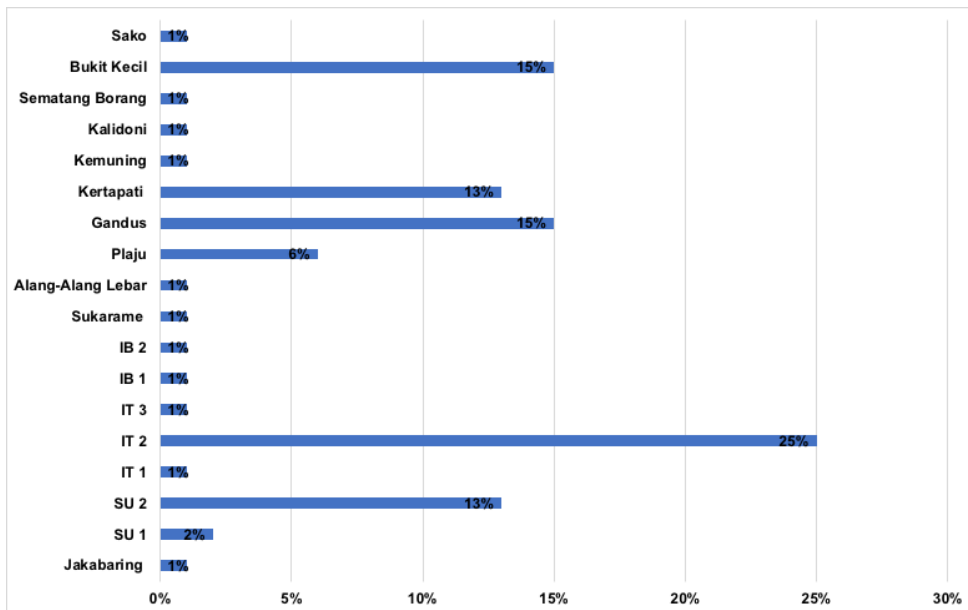
Terdapat beberapa bentuk usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, yaitu: belum mengurus badan usaha, perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD), comanditaire vennootschap (CV), dan perseroan terbatas (PT). Dari 100 responden telah menyatakan bahwa sebanyak 60% pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang belum mengurus badan usaha terhadap usaha yang dijalankan, sebanyak 21% merupakan perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD), sebanyak 10% merupakan comanditaire vennootschap (CV), dan sisanya sebesar 9% merupakan perseroan terbatas (PT). Berikut dapat dilihat diagram persentase bentuk usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.12 Diagram persentase bentuk usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Lokasi usaha**

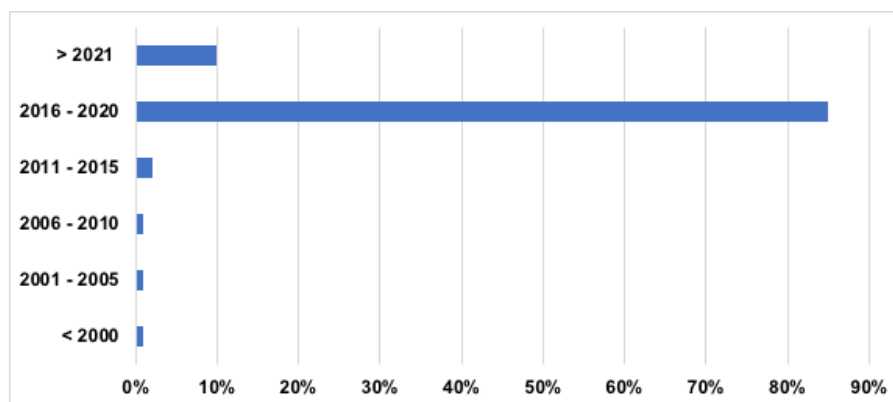
Berdasarkan pada lokasi usaha, pelaku UMKM dan industry berbasis keluarga tersebar secara merata di semua Kecamatan di Kota Palembang. Dari 100 responden telah menyatakan bahwa sebanyak 25% pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur II, sebanyak 13% berlokasi di Kecamatan Kertapati, sebanyak 15% berlokasi di Kecamatan Gandus, sebanyak 13% berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu II, sebanyak 15% berlokasi di Kecamatan Bukit Kecil, dan sisanya tersebar disemua Kecamatan di Kota Palembang. Berikut dapat dilihat diagram persentase lokasi usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.13 Diagram persentase lokasi usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Tahunan mulai usaha**

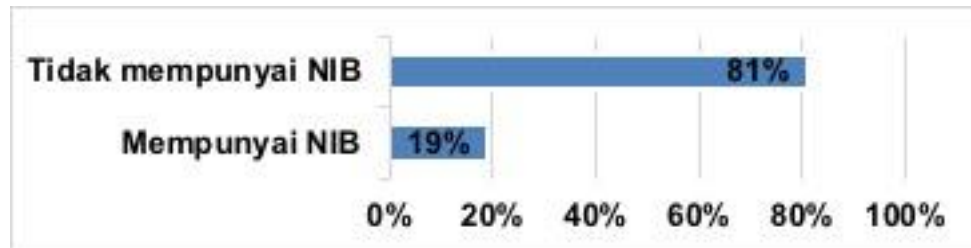
Berdasarkan tahunan mulai usaha, dapat teridentifikasi dari 100 responden pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, sebanyak 85% memulai usaha pada tahun 2016-2020, sebanyak 10% memulai usaha di atas tahun 2021, sisanya 5 persen memulai usaha di bawah tahun 2015. Berikut dapat dilihat diagram persentase tahunan mulai usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.14 Dilihat diagram persentase tahunan mulai usaha dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Perizinan usaha (kepemilikan NIB)**

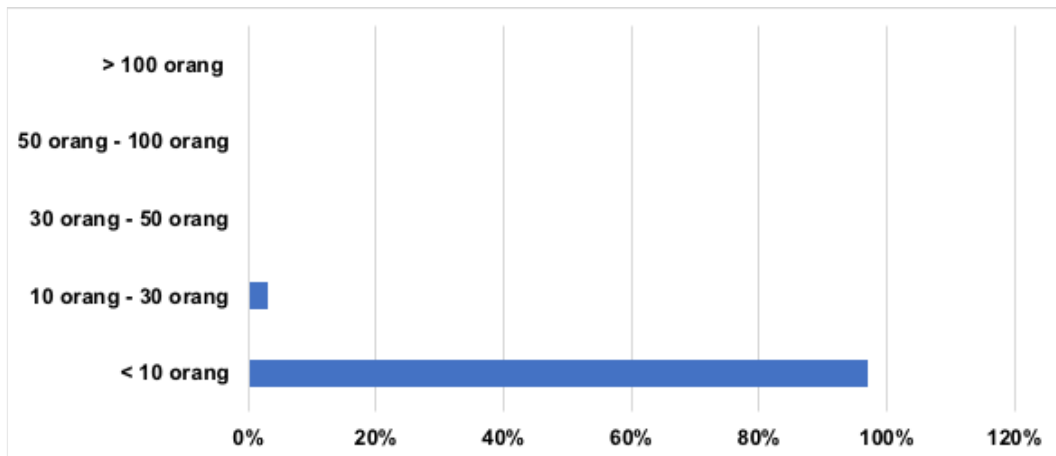
Pada dasarnya, seseorang yang dapat dikatakan sebagai wirausaha jika seseorang tersebut telah mempunyai NIB (nomor induk berusaha) termasuk dalam menjalankan usaha UMKM dan industri berbasis keluarga. Dapat teridentifikasi dari 100 responden pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang sebanyak 81% belum mempunyai NIB dan sisanya 19% telah mempunyai NIB. Berikut dapat dilihat diagram persentase perizinan usaha (kepemilikan NIB) dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.15 Diagram persentase perizinan usaha (kepemilikan NIB) dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Jumlah pegawai**

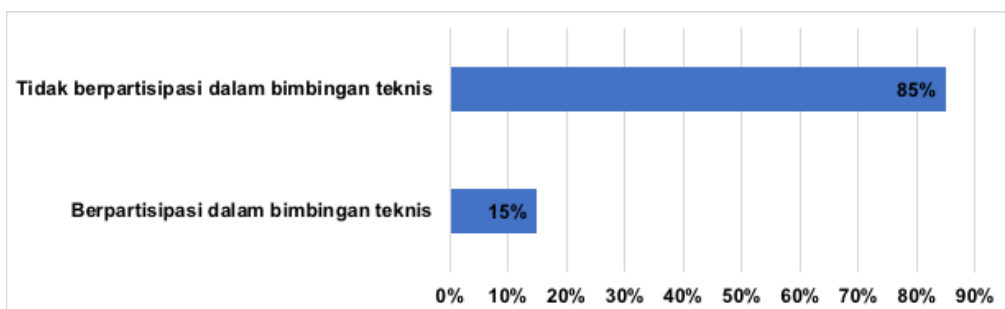
Berdasarkan hasil dari 100 responden, maka dapat diidentifikasi bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh Pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang sebanyak 97%. Sementara, 3% lainnya responden menyatakan bahwa memiliki jumlah pegawai kisaran 10 orang sampai dengan 30 orang. Berikut dapat dilihat diagram persentase jumlah pegawai yang dimiliki dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.16 Diagram persentase jumlah pegawai yang dimiliki dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Partisipasi bimbingan teknis**

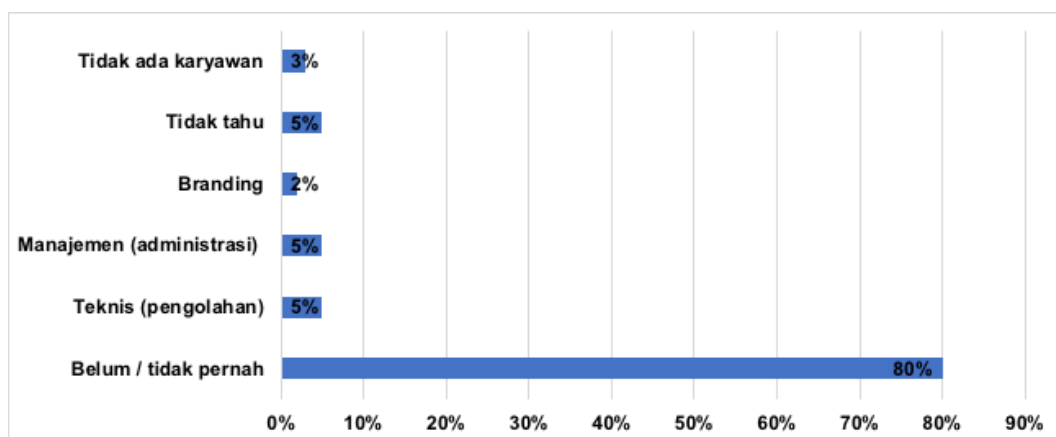
Berdasarkan partisipasi bimbingan teknik yang diikuti oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden menyatakan bahwa sebanyak 85% belum berpartisipasi dalam melakukan bimbingan teknik. Sementara itu, 15% lainnya menyatakan telah berpartisipasi dalam melakukan bimbingan teknis terkait jenis usaha yang dijalankan. Berikut dapat dilihat diagram persentase partisipasi bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.17 Diagram persentase partisipasi bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Jenis bimbingan teknis**

Terkait partisipasi bimbingan teknis dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, maka dapat diidentifikasi jenis bimbingan teknis yang telah diikuti oleh masyarakat. Dari 100 reponden, sebanyak 80% menyatakan belum pernah pernah berpartisipasi atau mengikuti bimbingan teknis, sebanyak 5% telah mengikuti bimbingan teknis terkait pengolahan, sebanyak 5% telah mengikuti bimbingan teknis terkait manajemen / administrasi, sebanyak 2% telah mengikuti bimbingan teknis terkait branding, sebanyak 5% tidak tahu terkait bimbingan teknis, dan sebanyak 3% para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga tidak mempunyai karyawan untuk diikutsertakan dalam bimbingan teknik. Berikut dapat dilihat diagram persentase jenis bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:

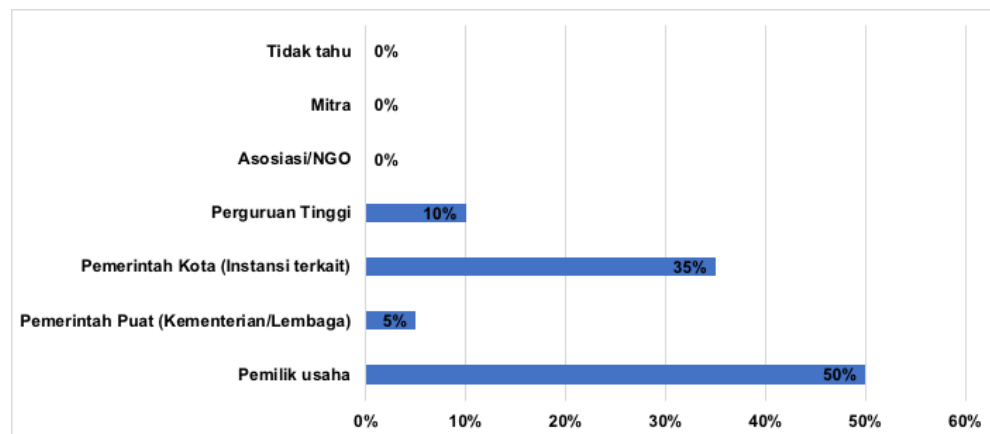


Gambar 4.18 Diagram persentase jenis bimbingan teknis dari pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Penyelenggara bimbingan teknis**

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, para pelaku tersebut telah mengikuti bimbingan teknis dari beberapa penyelenggara. Dari 100 responden, sebanyak 50% mengikuti

bimbingan teknis yang diselenggarakan langsung oleh pemilik usaha, sebanyak 35% mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (instansi terkait), sebanyak 10% mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, dan sisanya sebanyak 5% mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian atau Lembaga). Berikut dapat dilihat diagram penyelenggara bimbingan teknis teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:

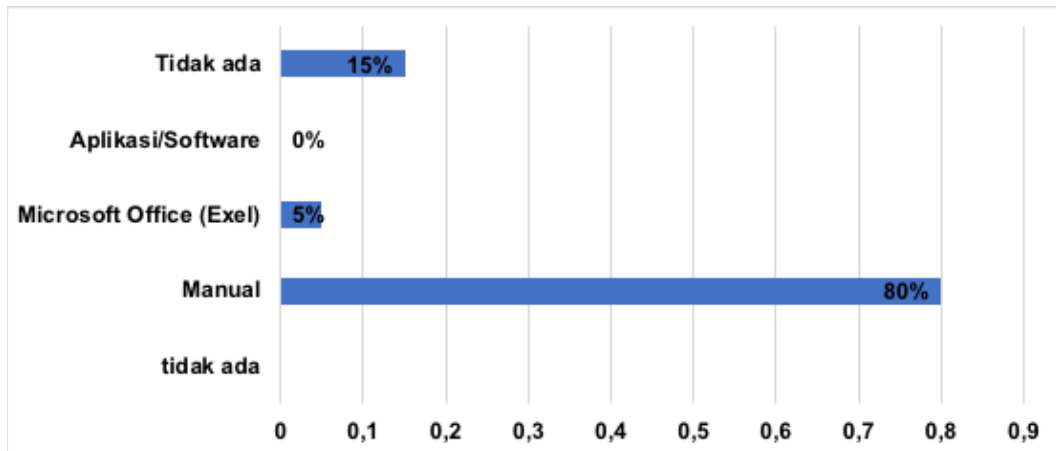


Gambar 4.19 Diagram penyelenggara bimbingan teknis teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Administrasi usaha yang digunakan**

Berdasarkan administrasi usaha yang digunakan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga, terdapat beberapa cara yang telah digunakan oleh para pelaku UMKM dan industri keluarga tersebut. Dari 100 responden, sebanyak 80% menyatakan administrasi usaha yang digunakan dalam kegiatan UMKM dan industri berbasis keluarga masih dengan cara manual, sebanyak 5% menyatakan menggunakan microsoft office (exel), dan sisanya 15% menyatakan tidak ada pembukuan secara administrasi pada usaha UMKM dan industri berbasis keluarga. Berikut dapat dilihat diagram administrasi usaha yang digunakan teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga

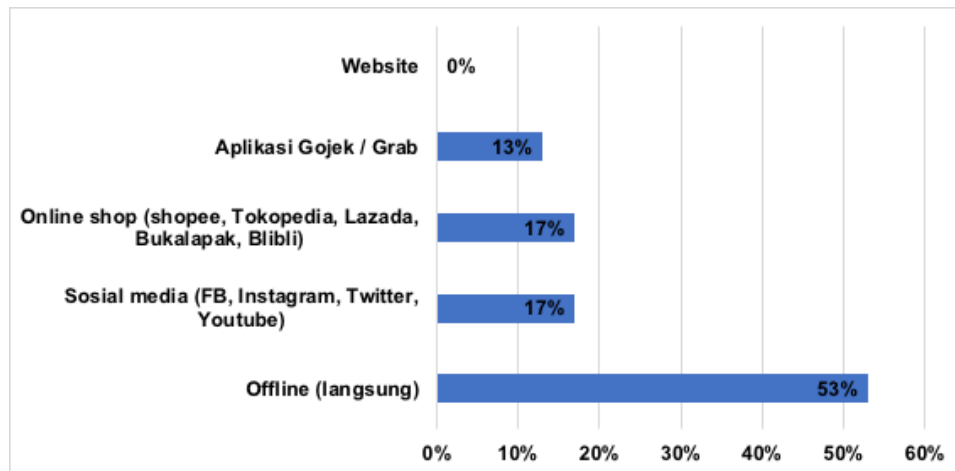
di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.20 Diagram administrasi usaha yang digunakan teruntuk pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Pemasaran produk**

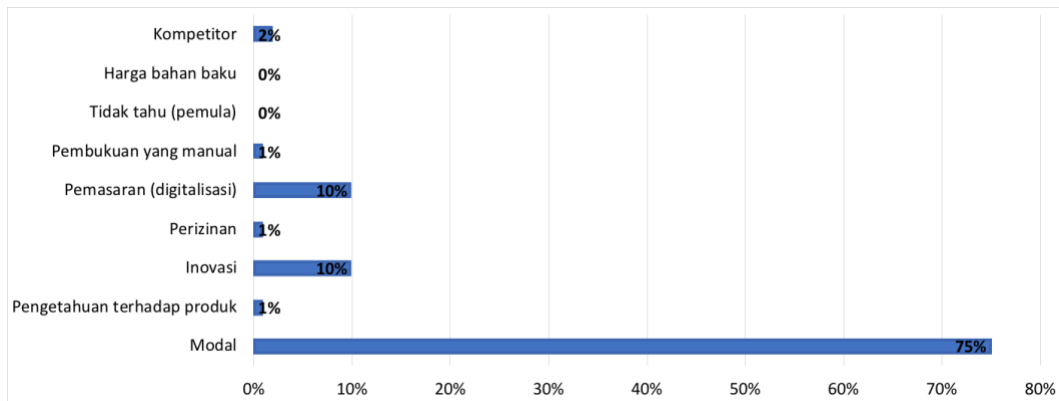
Pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang mempunyai beberapa cara dalam melakukan pemasaran produk usahanya. Terdapat beberapa cara dalam melakukan pemasaran produk UMKM dan industri berbasis keluarga, yaitu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dari 100 responden, sebanyak 53% menyatakan pemasaran produk yang dilakukan oleh pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang dilakukan secara offline (langsung), sebanyak 17% pemasaran dilakukan melalui sosial media (FB, instagram, twitter, you tube), sebanyak 17% pemasaran produk melalui online shop (shoppe, tokopedia, lazada, bukalapak, blibli), dan sisanya 13% pemasaran produk dilakukan melalui aplikasi gojek/grab. Berikut dapat dilihat diagram pemasaran produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.21 Diagram pemasaran produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Kendala yang dihadapi**

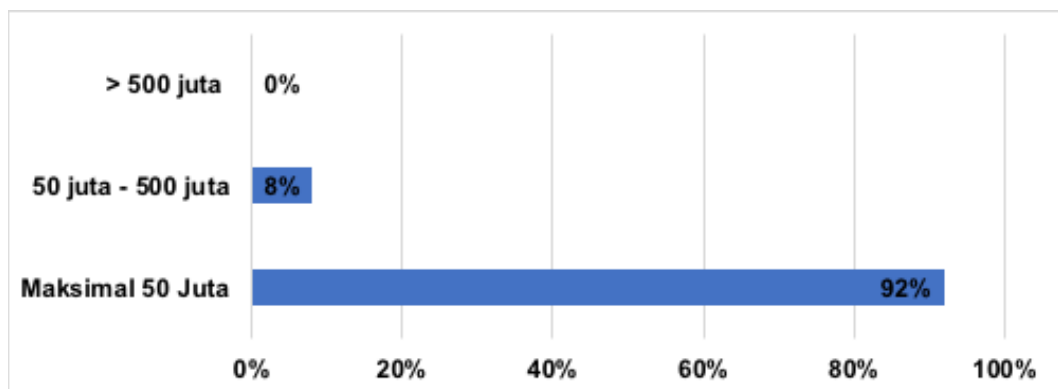
Para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang menghadapi berbagai macam kendala dalam menjalankan usahanya. Dari 100 responden, sebanyak 75% menyatakan kendala yang dihadapi ialah berkaitan dengan modal, lalu sebanyak 10% menyatakan bahwa inovasi dalam menjalankan usaha merupakan kendala yang dihadapi oleh para pelaku, sebanyak 10% juga menyatakan bahwa permasalahan terkait pemasaran menjadi kendala yang dihadapi oleh para pelaku, sisanya 15% merupakan kendala-kendala yang berkaitan dengan pengetahuan terdapat produk, perizinan, pembukuan yang manual, ketidaktahuan para pelaku, serta harga bahan baku. Berikut dapat dilihat diagram kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.22 Diagram kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Total aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)**

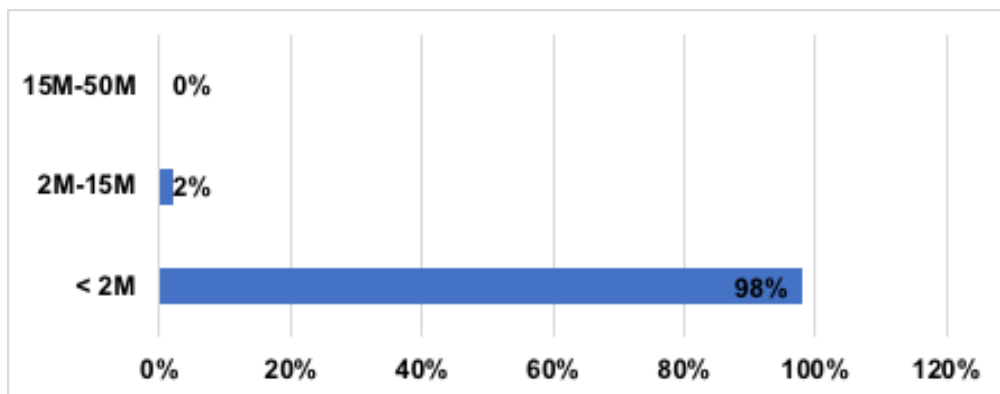
Dari 100 responden para para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota, sebanyak 92% menyatakan bahwa total aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) yang diperoleh oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang sebesar 0 – 50 juta (maksimal 50 juta). Lalu, sisanya sebanyak 8% menyatakan total aset bersih yang diperoleh ialah sebesar 50 juta – 500 juta. Berikut dapat dilihat diagram total aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.23 Diagram total aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

➤ **Total hasil penjualan**

Dari 100 responden para para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota, sebanyak 98% menyatakan bahwa total hasil penjualan yang telah dicapai sebesar <2M. Lalu, sisanya sebanyak 2% total hasil penjualan yang dicapai ialah sebesar 2M sampai dengan 15M. Berikut dapat dilihat diagram total hasil penjualan yang telah dicapai oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:





Gambar 4.24 Diagram total hasil penjualan yang telah dicapai oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga Hasil olahan, 2023



B. MEMETAKAN POTENSI UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (*HOME INDUSTRY*)



Berdasarkan total penghasilan atau omzet tahunan dari UMKM di Kota Palembang, telah teridentifikasi sebanyak 80.627 UMKM di Kota Palembang yang tersebar secara merata di setiap kecamatan. Lalu, berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga, maka telah teridentifikasi bahwa sebanyak lebih dari 50% jenis usaha kuliner mendominasi usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan telah ditelusuri beberapa kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang. Kawasan sentral tersebut terdiri atas kawasan sentral industri songket, kawasan sentral industri kain jumputan, kawasan sentral pempek, kawasan industri anyaman, kawasan sentral kerupuk/kemplang, kawasan sentral industri anyaman (nipah), dan kawasan sentral kuliner. Berikut dapat dilihat tabel persebaran kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang:

Tabel 4.6 Persebaran kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang

No	Kawasan Sentral	Lokasi (kecamatan)	Foto (Dokumentasi Observasi)
1	Kawasan sentral industri pengrajin songket	Kecamatan Ilir Barat II	
2	Kawasan sentral industri kain jumputan	Tuan kentang yang berdekatan dengan Sungai Ogan, Kecamatan Seberang Ulu I	

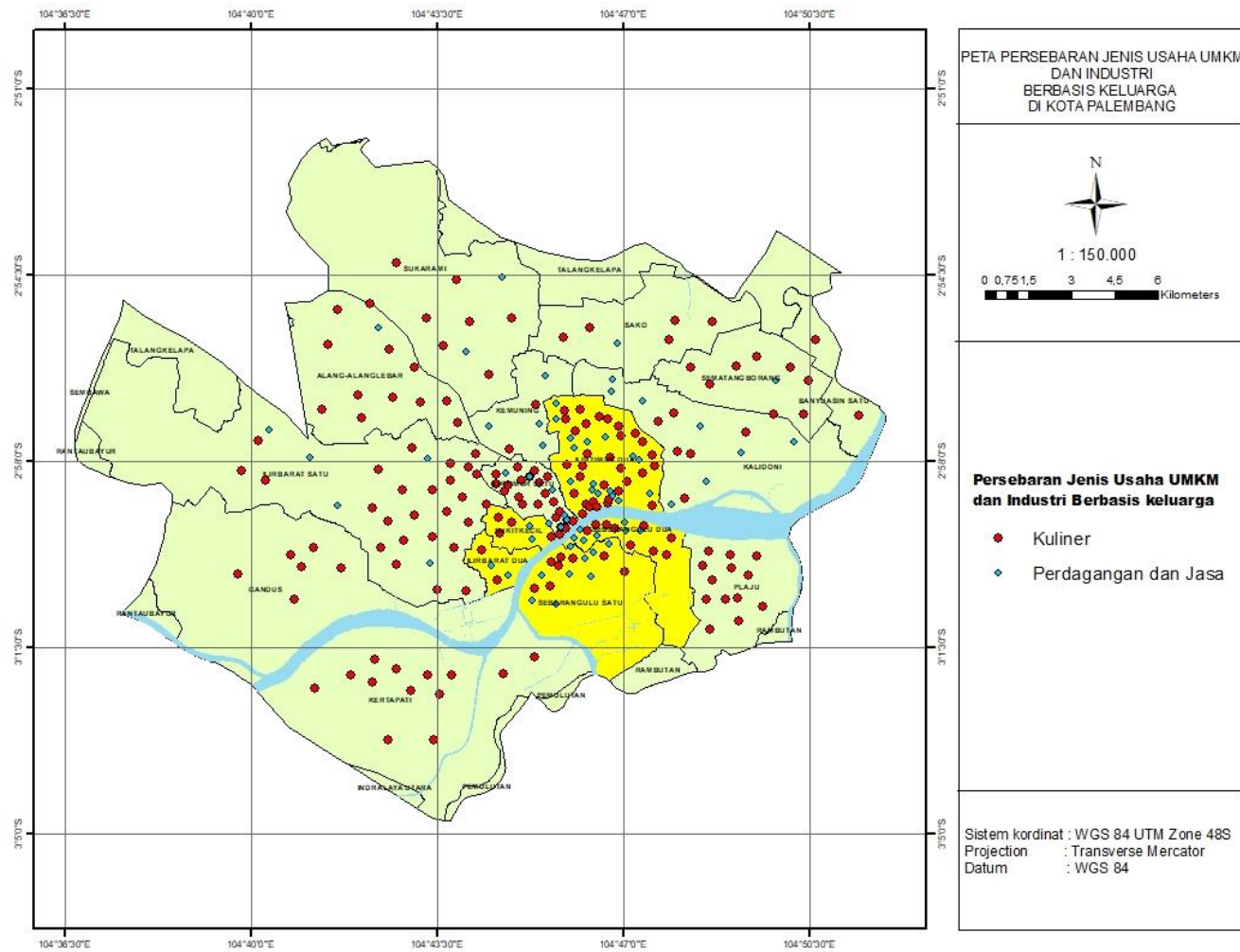
No	Kawasan Sentral	Lokasi (kecamatan)	Foto (Dokumentasi Observasi)
3	Kawasan kuliner pempek (kampung pempek 26 Ilir)	Kecamatan Bukit Kecil	
4	Kawasan sentral kemplang dan kerupuk (3-4 Ulu)	Kecamatan Seberang Ulu I	

No	Kawasan Sentral	Lokasi (kecamatan)	Foto (Dokumentasi Observasi)
5	Kawasan sentral industri kerajinan rotan	Kecamatan Ilur Timur II	
6	Kawasan sentral industri anyaman (nipah)	Kecamatan Seberang Ulu I	

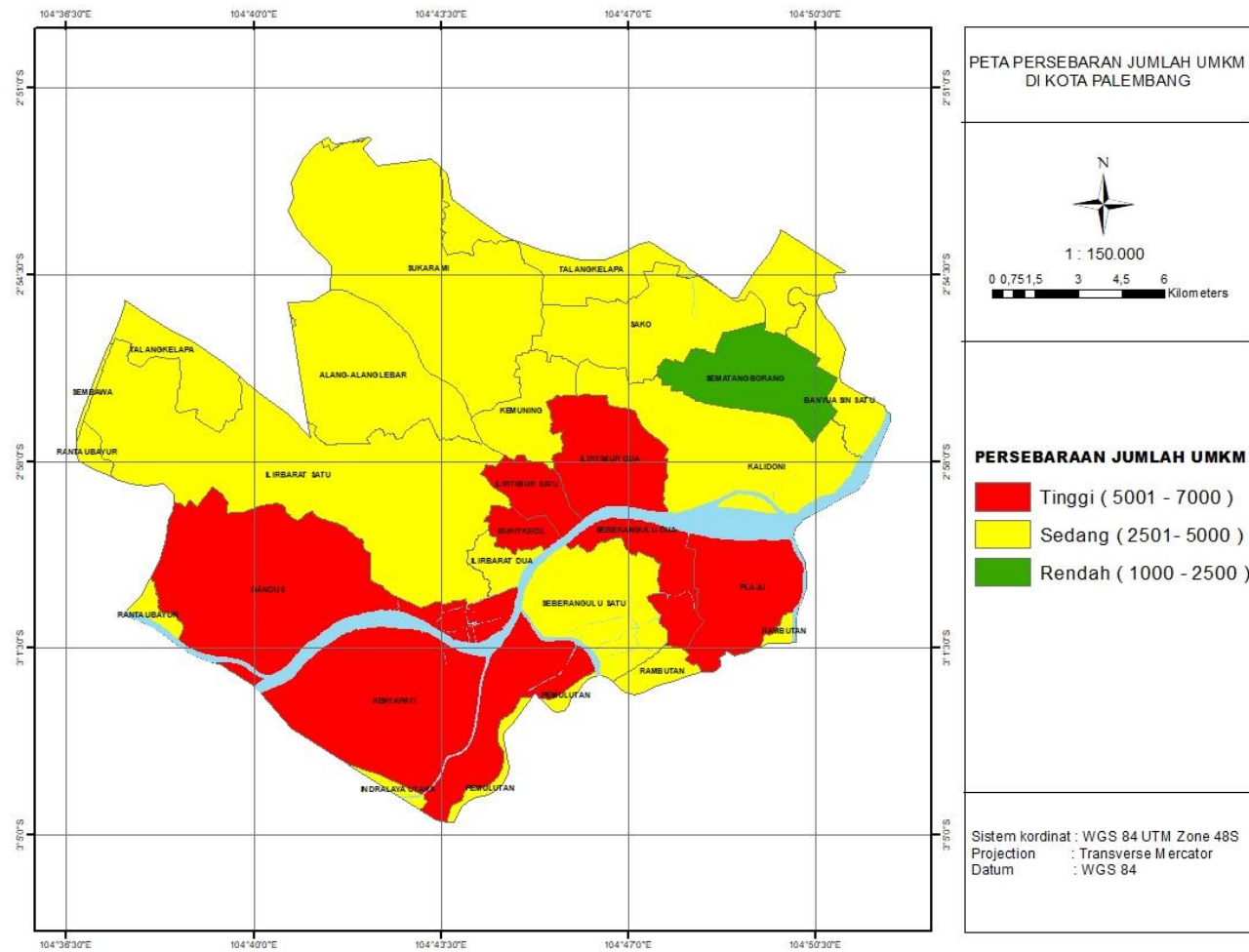
No	Kawasan Sentral	Lokasi (kecamatan)	Foto (Dokumentasi Observasi)
7	Kawasan sentral kuliner Palembang	Kecamatan Seberang Ulu I	

Hasil analisis, 2023

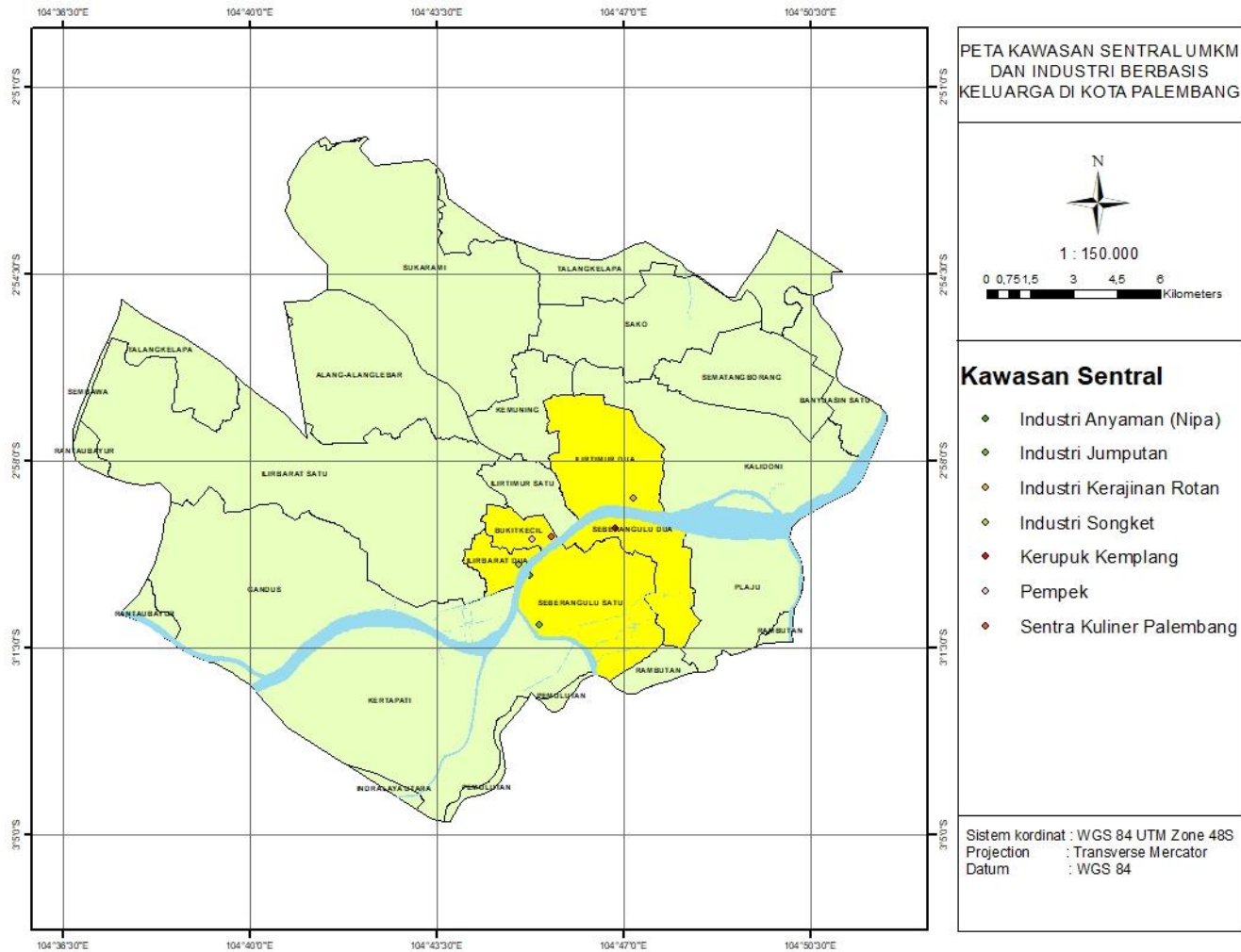
Berikut dapat dilihat kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada tabel di bawah ini:



Gambar 4.25 Peta persebaran jenis UMKM dan industri berbasis keluarga



Gambar 4.26 Peta Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang



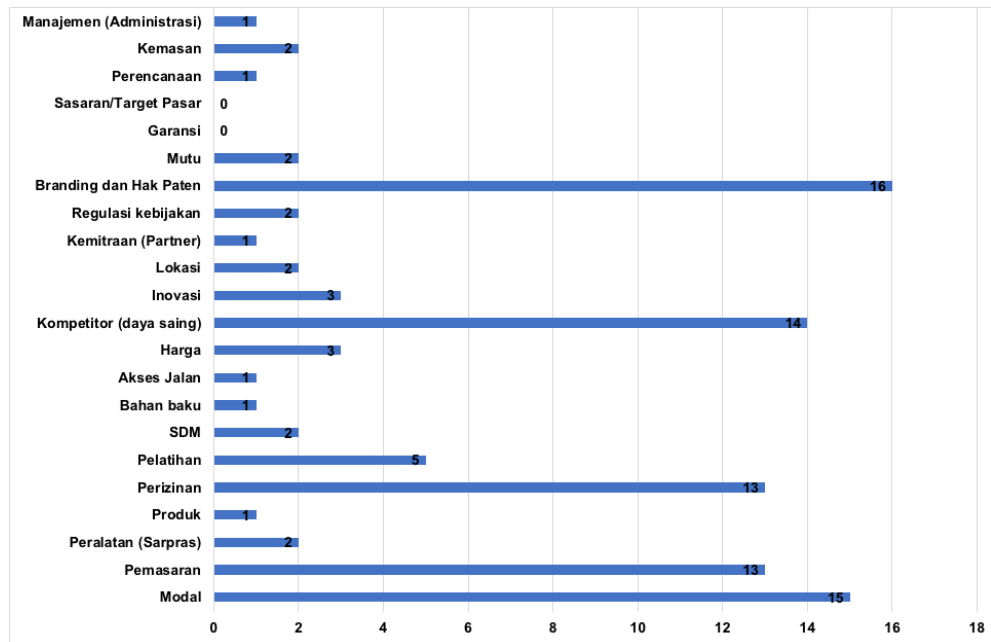
Gambar 4.27 Peta kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga

C. MERUMUSKAN STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (*HOME INDUSTRY*)

1. Penentuan Isu Strategis UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang

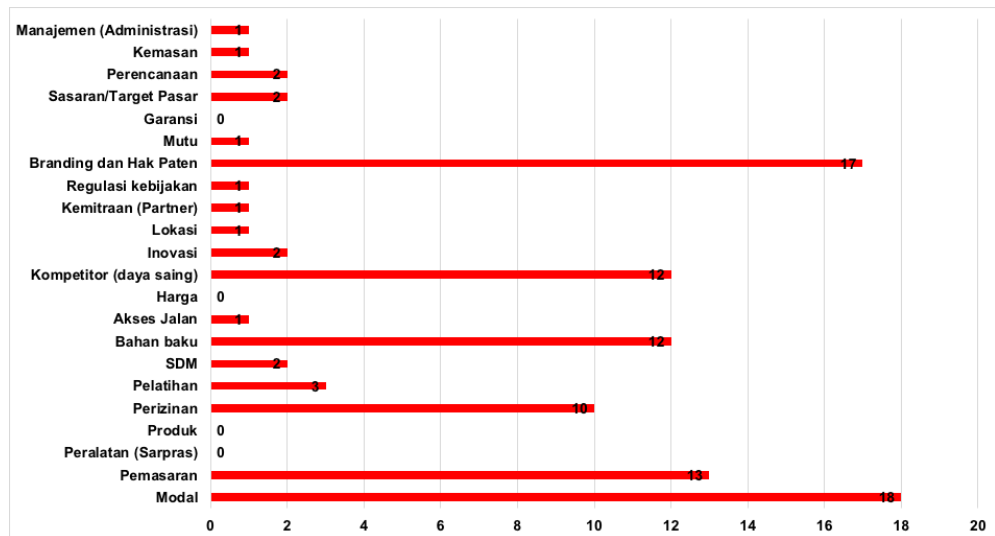
Terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, di antaranya: modal, pemasaran, peralatan (sarpras), produk, perizinan, pelatihan, SDM, bahan baku, akses jalan, harga, kompetitor (daya saing), inovasi, lokasi, kemitraan (partner), regulasi kebijakan, branding dan hak paten, mutu, garansi, sasaran/target pasar, perencanaan, kemasan, manajemen (administrasi).

Sebanyak 100 responden telah memberikan respon terkait isu-isu strategis yang berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga. Dari 100 responden, sebanyak 16% menyatakan bahwa isu terpenting berkaitan dengan branding dan hak paten, lalu sebanyak 15% berkaitan dengan modal, sebanyak 14% berkaitan dengan kompetitor (daya saing), sebanyak 13% berkaitan dengan pemasaran, sebanyak 13% berkaitan perizinan, dan sisanya 29% merupakan isu-isu lainnya. Berikut dapat dilihat persentasi isu-isu strategis terpenting berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.28 Isu-isu strategis terpenting berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

Selanjutnya, sebanyak 100 responden juga telah memberikan respon terkait isu-isu strategis paling bermasalah berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga. Dari 100 responden, sebanyak 18% menyatakan bahwa isu paling bermasalah berkaitan dengan modal, lalu sebanyak 17% berkaitan dengan branding dan hak paten, sebanyak 13% berkaitan dengan pemasaran, sebanyak 12% berkaitan dengan bahan baku, sebanyak 12% berkaitan dengan kompetitor (daya saing), dan sisanya 10% berkaitan dengan perizinan, lalu sisanya 18% merupakan isu-isu lainnya. Berikut dapat dilihat persentasi isu-isu strategis paling bermasalah berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.29 Isu-isu strategis paling bermasalah berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

Berdasarkan isu-isu strategis yang dilihat dari isu terpenting hingga yang paling bermasalah, maka dengan melihat skoring tertinggi dari masing-masing isu tersebut secara tidak langsung dapat diketahui isu strategi yang berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang. Berikut dapat dilihat hasil skoring isu-isu strategis UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.

Tabel 4.7 Skoring isu-isu strategis UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota

No	Isu-isu strategis	Jumlah		Keterangan
		Terpenting	Paling Bermasalah	
1	Modal	15	18	isu strategis
2	Pemasaran	13	13	isu strategis
3	Peralatan (Sarpras)	2	0	
4	Produk	1	0	
5	Perizinan	13	10	isu strategis
6	Pelatihan	5	3	

No	Isu-isu strategis	Jumlah		Keterangan
		Terpenting	Paling Bermasalah	
7	SDM	2	2	
8	Bahan baku	1	12	
9	Akses Jalan	1	1	
10	Harga	3	0	
11	Kompetitor (daya saing)	14	12	isu strategis
12	Inovasi	3	2	
13	Lokasi	2	1	
14	Kemitraan (Partner)	1	1	
15	Regulasi kebijakan	2	1	
16	Branding dan Hak Paten	16	17	isu strategis
17	Mutu	2	1	
18	Garansi	0	0	
19	Sasaran/Target Pasar	0	2	
20	Perencanaan	1	2	
21	Kemasan	2	1	
22	Manajemen (Administrasi)	1	1	

Hasil analisis, 2023

Berdasarkan respon dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, maka dapat diketahui bahwa isu strategis UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang terdiri atas:

1. Modal
2. Pemasaran
3. Perizinan
4. Kompetitor (daya saing)
5. Branding dan hak paten

Di sisi lainnya, berdasarkan respon dari OPD isu yang berkaitan dengan perizinan dan regulasi kebijakan menjadi hal yang perlu

mendapatkan perhatian. Tidak adanya free akses terkait monitoring portal data UMKM yang dapat dengan leluasa di kendalikan oleh OPD terkait, sehingga OPD terkait selalu menunggu pemutahiran data yang diberlakukan dari pusat (Wawancara, 2023). Selanjutnya, terkait perizinan dalam hal ini ialah NIB yang selalu menjadi permasalahan utama bagi pelaku UMKM di Kota Palembang. Tidak adanya kesadaran dari para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga untuk membuat NIB jika tidak ada kepentingan khusus yang mengharuskan mereka untuk membuat NIB (Wawancara, 2023).

2. Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan isu-isu strategi UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, maka dapat dirumuskan strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang), threats (ancaman) sebagai berikut:

Tabel 4.8 SWOT UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang

Srengths (kekuatan)	Weakness (kelemahan)
<ul style="list-style-type: none"> - Tersebar nya secara merata pelaku UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (S1) - Adanya kawasan sentral UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (7 kawasan sentral) (S2) - Dukungan dari OPD terkait (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang) terkait pemberdayaan para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang (S3) - Adanya regulasi yang mengatur terkait kemudahan, perlindungan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data UMKM dan industri berbasis keluarga (W1) - Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga dalam mengurus NIB (W2) - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan teknis terkait UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang (W3) - Kurangnya penerapan ICT (information communicaton technology) dalam pelaksanaan UMKM dan

<p>pemberdayaan koperasi dan usaha, mikro, kecil, dan menengah sebagai dasar atau landasan (S4)</p>	<p>industri berbasis keluarga (W4)</p>
<p>Opportunities (peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan mitra atau stakeholder yang dapat mendukung UMKM dan industri berbasis keluarga (O1) - Ketersediaan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang sebagai potensi pengembangan (O2) 	<p>Threats (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi (era disrupsi), perkembangan teknologi yang akan berperan penting dalam aktivitas UMKM dan industri berbasis keluarga (T1) - Kompetitor (daya saing) antar pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga menjadi ancaman jika para pelaku tidak melakukan peningkatan baik secara teknis ataupun non teknis dalam menjalankan UMKM dan industry berbasis keluarga (T2)

Hasil analisis, 2023

Tabel 4.9 Matching Tools dalam analisis SWOT UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang

	<p>Srengths (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersebar nya secara merata pelaku UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (S1) - Adanya kawasan sentral UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (7 kawasan sentral) (S2) - Dukungan dari OPD terkait (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang) terkait pemberdayaan para pelaku UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (S3) - Adanya regulasi yang mengatur terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha, mikro, kecil, dan menengah sebagai dasar atau landasan (S4) 	<p>Weakness (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data UMKM dan industry berbasis keluarga (W1) - Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM dan industry berbasis keluarga dalam mengurus NIB (W2) - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan teknis terkait UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang (W3) - Kurangnya penerapan ICT (information communicaton technology) dalam pelaksanaan UMKM dan industry berbasis keluarga (W4)
<p>Opportunities (peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan mitra atau stakeholder yang dapat mendukung UMKM dan industry berbasis keluarga (O1) - Ketersediaan UMKM dan industry berbasis keluarga di 	<p>Strategi pemberdayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama mitra (kemitraan) - Pelatihan atau bimbingan teknis - Peningkatan inovasi <p>Strategi penguatan</p>	

<p>Kota Palembang sebagai potensi pengembangan (O2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan industri berbasis keluarga dengan cara perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing. - Pengembangan kewirausahaan. - Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM dan industri berbasis keluarga.
<p>Threats (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi (era disrupsi), perkembangan teknologi yang akan berperan penting dalam aktivitas UMKM dan industri berbasis keluarga (T1) - Kompetitor (daya saing) antar pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga menjadi ancaman jika para pelaku tidak melakukan peningkatan baik secara teknis ataupun non teknis dalam menjalankan UMKM dan industry berbasis keluarga (T2) 	<p>Strategi perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UMKM. - Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyeleras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. - Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. - Membangun sistem pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan UMKM.

Hasil analisis, 2023



Gambar 4.30 Strategi pengembangan UMKM dan industry berbasis keluarga di Kota Palembang Hasil olahan, 2023

Berdasarkan analisis SWOT terkait UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan

Starategi pemberdayaan merupakan strategi yang dirumuskan dengan melihat keterkaitan antara **S1, S2 – W2, W3, W4 – O1, O2 – T1, T2**. Terdapat beberapa strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan, yaitu:

- Kerjasama mitra (kemitraan)
- Pelatihan atau bimbingan teknis
- Peningkatan inovasi

2. Strategi penguatan

Starategi penguatan merupakan strategi yang dirumuskan dengan melihat keterkaitan antara **S1, S2, S3 - W1 – O2**. Terdapat beberapa strategi penguatan yang dapat diterapkan, yaitu:

- Peningkatan kapasistas dan kompetensi UMKM dan industri berbasis keluarga dengan cara perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing.
- Pengembangan kewirausahaan.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM dan industri berbasis keluarga.

3. Strategi perlindungan

Starategi perlindungan merupakan strategi yang dirumuskan dengan melihat keterkaitan antara **S1, S2, S3, S4 – W1, W2 – O2**. Terdapat beberapa strategi perlindungan yang dapat diterapkan, yaitu:

- Membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat

tinggi untuk pengembangan UMKM.

- Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyeleras program pemberdayaan UMKM di Indonesia.
- Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah.
- Membangun sistem pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan UMKM.

- Perumusan Program

Tabel 4.10 Rumusan program UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang

No	Strategi	Program
1	Strategi Pemberdayaan	
	- Kerjasama mitra (kemitraan)	<ul style="list-style-type: none"> - Temu usaha kemitraan UMKM dan industri berbasis keluarga bersama BUMN/BUMD. - Menjalin komunikasi dan kerjasama antara tim UMKM dan industri berbasis keluarga dengan Perguruan Tinggi. - Menjalin komunikasi dan kerjasama antara tim UMKM dan industri berbasis keluarga dengan pengelola tempat wisata. - Menjalin komunikasi dan kerjasama antara tim UMKM dan industri berbasis keluarga dengan museum. - Menjalin komunikasi dan kerjasama antara tim UMKM dan industri berbasis keluarga dengan manajemen hotel.
	- Pelatihan / bimbingan teknis	<p>Perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terkait perizinan berwirausaha sebagai pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga - Bimbingan teknis terkait pengurusan NIB (nomor izin berusaha) - Bimbingan teknis terkait pengurusan PIRT (pangan industri rumah tangga) <p>Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM - Sosialisasi sertifikasi hak atas tanah sebagai jaminan pembiayaan bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan kelayakan usaha dibidang UMKM dan industri berbasis keluarga (terkhusus bagi usaha jumputan). - Pelatihan keterampilan usaha bagi usaha Songket. - Pelatihan keterampilan usaha bagi usaha pempek.

No	Strategi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan usaha bagi usaha kerupuk dan kemplang. <p>Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisais kredit usaha rakyat (KUR) dan penjaminan kredit daerah serta peraturan OJK (otoritas jasa keuangan) kepada UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis penjaminan kredit bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Workshop penyusunan proposal kredit ke lembaga keuangan bank dan non bank. - Bimbingan teknis pemanfaatan ICT (information communication technology) bagi pengembangan sistem keuangan UMKM dan industri berbasis keluarga. - Rapat koordinasi pelaku usaha dengan PKBL / CSR dan LPDB lembaga pengelola dana secara berkala (terjadwal). - Sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis asistensi pembiayaan UMKM dan industri berbasis keluarga. - Worksop pemanfaatan lembaga pembiayaan export Indonesia bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. <p>SDM (Sumer Daya Manusia)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Sosialisasi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga di bidang aneka usaha. - Pelatihan bagi pendampik UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. <p>Branding / Hak Paten HAKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Hak Paten dengan dana cukai bagi UMKM dan industri berbasis keluarga.

No	Strategi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Workshop mengenai urgensi hak paten dan merek (branding) produk bagi UMKM. - Pelatihan HAKI dan Hak Paten bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi ISO bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi BPOM bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi equitable food initiative (EFI) bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Sosialisasi HALI / legalasi usaha perizinan bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. <p>Sasaran / target</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan strategi mengenali calon customer. - Pelatihan strategi menguasai pangsa pasar lokal (strategi pemetaan pangsa pasar. - Pelatihan strategi mengenai cara cepat memasuki pasar regional. - Pelatihan strategi mengenai percepatan penyesuaian pasar nasional. - Pelatihan strategi memasuki pasar internasional / ekspor. <p>Perencanaan, Kemasan, Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop identifikasi dan pemetaan jenis usaha potensial bagi UMKM dan industri berbasis keluarga di tingkat kecamatan. - Bimbingan teknis terkait strategi pemasaran produk UMKM dan industri berbasis keluarga. - Sosialisasi sistem OSS berbasis risiko (OSS RBA) kepada UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis pengembangan desain kemasan produk bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis terkait pengembangan packaging bagi UMKM dan industri berbasis keluarga dalam penciptaan brand image.

No	Strategi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis terkait manajemen usaha bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis terkait sistem keuangan bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan manajemen perpajakan bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Pelatihan kewirausahaan atau motivasi usaha dan manajemen usaha. - Pelatihan dalam melakukan penyusunan data statistic UMKM dan industri berbasis keluarga, serta penyediaan data statistic UMKM dan industri berbasis keluarga.
	Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan teknis terkait pengembangan kualitas produk handycraft bagi UMKM dan industri berbasis keluarga khususnya songket. - Bimbingan teknis terkait pengembangan kualitas produk handycraft bagi UMKM dan industri berbasis keluarga khususnya songket. - Bimbingan teknis terkait pengembangan kualitas produk handycraft bagi UMKM dan industri berbasis keluarga khususnya jumputan. - Bimbingan teknis terkait peningkatan daya mutu bagi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Bimbingan teknis terkait peningkatan mutu produk usaha makanan dan minuman dengan menggunakan teknologi tepat guna.
2	Strategi Penguatan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM dan industri berbasis keluarga dengan cara perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi UMKM dan industri berbasis rumah tangga untuk memperluas online marketplace. - Perluasan pasar offline (optimalisasi bandara, rest area, pusat perbelanjaan, pasar malam, dan revitalisasi pasar rakyat) untuk produk UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk masuk ke pasar global. - Kurasi produk UMKM dan industri berbasis rumah tangga dengan standar nasional atau bahkan internasional.

No	Strategi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama lintas sektor, OPD dan kementerian terkait untuk mengikuti promosi dalam skala nasional maupun internasional. - Optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral untuk UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Pembentukan kantor bersama ekspor untuk produk UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Menyusun Studi Kelayakan Factory Sharing - Membentuk kelembagaan (inisiasi pilot project sampai dengan scale-up) - Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi dan pendampingan untuk para pelaku UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Mendukung pelaku UMKM dan dan industri berbasis rumah tangga (knowledge management, internasional coaching, dll) untuk ,mendapat sertifikat standar internasional dan masuk pasar global - Transfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi produksi bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Memberikan akses terhadap fasilitas mesin dan teknologi bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis rumah tangga. - Menyempurnakan konektivitas rantai pasok di sentra produksi - Pengembangan e-Logistic yang terintegrasi dengan e-Commerce dan fintech - Mengembangkan inkubasi dan akselerasi usaha rintisan - Pengembangan platform ekosistem usaha (pembiayaan, logistik, pemasaran, inovasi)
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan pusat layanan konsultasi serta pendampingan online dan offline (pusat dan daerah) termasuk klinik pasar modal bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Menyediakan layanan ahli dalam pendampingan usaha (manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM) bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga.

No	Strategi	Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan vokasi kewirausahaan untuk pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Fasilitasi akses teknologi, inovasi, dan perluasan pasar bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Kemitraan penyelenggaraan diklat dengan swasta dan lembaga nasional atau bahkan internasional bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga.
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM dan industri berbasis keluarga dengan cara one gate policy 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi Nasional Pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga. - Mendorong Sensus dan Survei Berkala untuk Penyempurnaan Data UMKM dan industri berbasis keluarga. - Membuat Sistem Informasi Terintegrasi antar OPD terkait dengan Kementerian terkait mengenai semua informasi UMKM dan industri berbasis keluarga. - Membentuk Project Management Office untuk akselerasi Kemitraan berbasis Komoditi Unggulan untuk para UMKM dan industri berbasis keluarga. - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi baik untuk skala OPD maupun bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. - Peningkatan Peran Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria UMUM dan industri berbasis keluarga dalam dana insentif daerah. 2. Menetapkan standar pelayanan minimal UMUM dan industri berbasis keluarga. 3. Menetapkan alokasi tata ruang bari para pelaku UMUM dan industri berbasis keluarga. 4. Mengalokasikan ruang dengan tarif khusus perkotaan, perkantoran, dan kuster industri bagi para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. 5. Melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pemberian penghargaan baik kepada OPD tekait dalam pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga.
3	Strategi Perlindungan	

No	Strategi	Program
	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat komitmen bersama secara lokal (tingkat kota) dalam pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga 	<p>Pembentukan Dewan Lokal Pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga yang ketuaai oleh instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang) sebagai salah satu opsi untuk mewujudkan komitmen tingkat tinggi dalam pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyelaras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. 	<p>Membangun basis data program terpadu serta mekanisme pelaporan program pemberdayaan UMKM dan industri berbasis keluarga lintas sektor dalam one gate policy. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan tambahan pasal yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah koordinator pelaksana keseluruhan program pemberdayaan UMKM tingkat nasional sampai dengan daerah dan berhak menyelenggarakan sistem basis data terpadu lintas sektor serta sistem pengawasan dan evaluasi program - Meningkatkan kategori kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kategori I untuk melaksanakan fungsi penyelaras kebijakan khusus UMKM. - Meningkatkan alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun basis data dan pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor di tingkat nasional dan daerah.
	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koperasi dan UKM dapat melakukan koordinasi penyusunan basis data terpadu program pemberdayaan UMKM yang komprehensif antarsektor di tingkat nasional dan daerah. - Kementerian Koperasi dan UKM kemudian dapat mengidentifikasi tumpang-tindih penerima program serta menentukan kebutuhan program untuk berbagai jenis UMKM.

No	Strategi	Program
	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan menjalankan sistem pemantauan dan evaluasi dengan memberikan umpan balik bagi pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga dalam melaksanakan program dan mencapai target. - Membuat arah kebijakan pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga yang bersifat <i>one-size fits all</i> atau satu ukuran untuk semua yang untuk memenuhi kebutuhan setiap UMKM dan industri berbasis keluarga yang karakteristiknya beragam. - Membuat program pelatihan kompetensi sumber daya manusia UMKM dan industri berbasis keluarga yang dapat ditargetkan untuk UMKM dan industri berbasis keluarga yang memiliki visi mengembangkan usaha dalam hal ini adanya desain program yang dibuat

Hasil analisis, 2023

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting UMKM dan industri berbasis keluarga dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 80.627 (per Desember 2022) UMKM dan industri berbasis keluarga yang tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan kategori pangan (tahun 2022), diketahui terdapat 730 UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang yang telah mempunyai SPPIRT dan NIB
2. Jumlah usaha mikro di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau omzet tahunan dimulai dari 0 sampai dengan < 2M sebanyak 80.563 usaha mikro yang tersebar secara merata di setiap kecamatan di Kota Palembang. Kecamatan dengan jumlah usaha mikro paling tinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur II dengan jumlah sebanyak 6.650 usaha mikro, sedangkan kecamatan dengan jumlah usaha mikro paling rendah ialah Kecamatan Sematang Borang dengan jumlah sebanyak 1.695 usaha mikro.
3. Jumlah usaha kecil di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau omzet tahunan dimulai dari 2M sampai dengan 15M sebanyak 52 usaha mikro yang terdapat di 13 kecamatan selain Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Ilir Timur III, Sako, dan Sukarami. Kecamatan dengan jumlah usaha kecil terbanyak terdapat di Kecamatan Seberang Ulu II sebanyak 15 usaha kecil, sedangkan Kecamatan dengan jumlah usaha kecil paling rendah dengan jumlah usaha kecil sebanyak 0 usaha kecil (tidak ada) terdapat di Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Ilir Timur III, Sako, dan Sukarami.
4. Jumlah usaha menengah di Kota Palembang dengan hasil penjualan atau omzet tahunan dimulai dari 15M sampai dengan 50M sebanyak

12 usah menengah. Kecamatan dengan jumlah usaha menengah paling tinggi terdapat di Kecamatan Seberang Ulu II, sedangkan kecamatan dengan jumlah usaha menengah sebanyak 0 usaha kecil (tidak ada) terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Seberang Ulu II, Plaju, Ilir Timur I, Kemuning, dan Kalidoni.

5. Jumlah UMKM yang terdapat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang per Desember 2022 dengan jumlah UMKM secara keseluruhan sebanyak 80.627 UMKM. Kecamatan dengan jumlah UMKM paling tinggi terdapat di Kecamatan Ilir Timur II, sedangkan kecamatan dengan jumlah UMKM paling rendah terdapat di Kecamatan Sematang Borang
6. Jumlah UMKM dan industri berbasis keluarga yang telah mempunyai SPPIRT dan NIB, maka dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling banyak mengurus SPPIRT dan NIB ialah Kecamatan Ilir Timur III yaitu sebanyak 60, lalu Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 51, dan dilanjutkan dengan Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 57. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah SPPIRT dan NIB yang paling sedikit ialah Kecamatan Gandus.
7. Identifikasi ke para pelaku UMKM dan industri berbasis keluarga meliputi beberapa informasi yang diperoleh, diantaranya: : identitas pelaku UMKM (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan), jenis usaha, bentuk usaha yang dijalankan, lokasi usaha, tahunan mulai usaha, perizinan (kepemilikan NIB), jumlah pegawai, partisipasi bimbingan teknis, jenis bimbingan teknis, penyelenggara bimbingan teknis, administrasi usaha yang digunakan, pemasaran, kendala yang dihadapi, total aset bersih, dan total penjualan.
8. Beberapa kawasan sentral UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang. Kawasan sentral tersebut terdiri atas kawasan sentral industri songket di Kecamatan Ilir Barat II, kawasan sentral industri kain jumputan di Kecamatan Seberang Ulu I, kawasan sentral pempek di Kecamatan Bukit Kecil, kawasan industri anyaman

di Kecamatan Seberang Ulu I, kawasan sentral kerupuk/kemplang di Kecamatan Seberang Ulu I, kawasan sentral industri anyaman (nipah) di Kecamatan Seberang Ulu I, dan kawasan sentral kuliner di Kecamatan Seberang Ulu I.

9. Terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, di antaranya: modal, pemasaran, peralatan (sarpras), produk, perizinan, pelatihan, SDM, bahan baku, akses jalan, harga, kompetitor (daya saing), inovasi, lokasi, kemitraan (partner), regulasi kebijakan, branding dan hak paten, mutu, garansi, sasaran/target pasar, perencanaan, kemasan, manajemen (administrasi). isu-isu strategis yang dilihat dari isu terpenting hingga yang paling bermasalah, maka dengan melihat skoring tertinggi dari masing-masing isu tersebut secara tidak langsung dapat diketahui isu strategi yang berkaitan dengan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, yaitu: modal, pemasaran, perizinan, kompetitor (daya saing), branding hak paten, regulasi kebijakan.
10. Terdapat beberapa strategi pengembangan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang, yaitu: strategi pemberdayaan

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Palembang, disarankan untuk membentuk Tim UMKM dan industri berbasis keluarga secara terpadu yang bertugas untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan, asistensi, sampai ke pengemasan dan pemasaran produk UMKM dan industri berbasis keluarga.
2. Pemerintah Kota Palembang perlu mempersiapkan sentral pusat oleh-oleh produk UMKM dan industri berbasis keluarga di beberapa lokasi wisata misal: outlet khusus di Benteng Kuto Besak dan tempat-tempat ikonik lainnya.

3. Perlu dilakukannya pemetaan (mapping stakeholders), pembagian tugas dan peran, serta penyusunan program berdasarkan isu strategis umkm kota Palembang dengan melibatkan: instansi terkait, asosiasi/lsm, swasta, perbankan, perguruan tinggi, media, dan pelaku umkm. Dengan tujuan, membangun persamaan persepsi dan komitmen serta menjalin kerjasama dalam rangka mengembangkan umkm dan memonitor pertumbuhan umkm di Kota Palembang.
4. Pemerintah Kota Palembang, melalui OPD terkait menjalin kerjasama dengan stakeholders terkait untuk menyusun program pelatihan, bimtek, bagi owner dan karyawan pelaku umkm dengan tema sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis, untuk mendorong peningkatan level umkm yang ada di kota Palembang secara bergantian di setiap kecamatan, sehingga selain untuk pemerataan edukasi, dan pendataan juga menjadi bagian dari monitoring serta evaluasi program pengembangan umkm di setiap tahunnya, khususnya terkait sosialisasi pengetahuan dasar umkm dan pentingnya kompetensi baik bagi owner maupun karyawan dalam menjalankan usaha, perizinan, serta pemasaran produk secara digitalisasi (online).
5. Perlu adanya tindak lanjut kegiatan kajian, khususnya terkait pemetaan jenis usaha potensial tingkat Kecamatan dalam rangka percepatan peningkatan UMKM dan industri berbasis keluarga di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. M. (2020). Ini Faktor Penyebab Target Binaan UMKM Kota Palembang Belum Tercapai. IDN Time.
- Emiliasari & Kosmajadi. 2020. Pendampingan Penerapan Manajemen Pemasaran Produk Home Industridesa Cikadu. Jurnal Parahita Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume I Nomor 2, April 2020, Halaman 106 –115
- Hamzah Lies Maria & Agustien Devi. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 215–227.
- Hatten, K. J. and Hatten, M. L. 1996. “*Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability,*” *Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc
- Gita Rosalita Armelia dan Anita Damayantie, Jurnal Sociologie Vol 1, Peran PTPN VII dalam Pemberdayaan Home Industri Keripik Pisang. 339.
- Praditya, M. (2010). “Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri” (Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
- Sartini pawe. (2007). Peranan industri rumah tangga dalam peningkatan pendapatan masyarakat di desa Roworena kecamatan Ende selatan kabupaten Ende” (Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2007).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.
- Pandji Anoraga. 2010. Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010
- Pearce II, Jhon A. dan Richard B. Robinson, Jr. 1997. “Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian”. Edisi pertama, diterjemahkan oleh Ir. Agus Maulana MSM., Jakarta: Binarupa Aksara.
- Suratiyah. (1991). Industri Kecil dan Rumah Tangga (Pengertian, Definisi, dan Contohnya), UGM, (Yogyakarta: 1991).

Yunus, H. S. (2017). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR LAMPIRAN
PERSEBARAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA DI
KOTA PALEMBANG



DAFTAR LAMPIRAN
WAWANCARA PELAKU UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG



DAFTAR LAMPIRAN
WAWANCARA MENDALAM BERSAMA OPD TERKAIT



Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang



Dinas Kesehatan Kota Palembang

DAFTAR LAMPIRAN
FGD BERSAMA PELAKU UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG (FGD)





LAPORAN AKHIR

PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN UMKM DAN INDUSTRI BERBASIS KELUARGA (HOME INDUSTRI)